

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Studi tentang Pemilukada dan Perilaku Pemilih pada Pemilukada

Sudah banyak studi yang berperspektif perilaku pemilih terkait dengan pelaksanaan Pemilukada di Indonesia sejak pertengahan tahun 2005. Namun demikian, sesungguhnya studi perilaku pemilih juga telah dilakukan dengan latar belakang politik Orde Baru. Studi Gaffar (1992) dan Malarangeng (1997) mengupas tentang perilaku pemilih dalam Pemilu-Pemilu Orde Baru pada dekade 1990-an yang diikuti oleh tiga kontestan Pemilu, yaitu Golkar, PPP dan PDI. Kendatipun sama-sama menganalisis konteks Pemilu legislatif, berbeda dari kedua studi tersebut, King (2003) menelaah pengalaman Pemilu pertama kali pada era reformasi, yakni Pemilu 1999, dengan menarik kontinuitas dan perubahannya dengan Pemilu pertama kali dalam sejarah Indonesia, yakni Pemilu 1955. Berbeda dengan King (2003), terdapat studi Mujani (2007) yang menelaah konteks perilaku pemilih pasca-Orde Baru yang lebih terfokus pada hal-ikhwal pemilih muslim dalam merepons demokrasi.

Dalam kaitannya dengan Pemilukada, studi perilaku pemilih termasuk masih relatif baru. Di antara literatur yang cukup menonjol adalah studi Choi (2011) yang menelaah perilaku pemilih dalam beberapa kasus Pemilukada di Indonesia dengan karakteristik dan temuan yang berbeda-beda. Fokus penelitiannya adalah Pemilukada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Kepulauan Riau, Kota Batam, Kota Depok, dan Kabupaten Banyuwangi.

Choi memfokuskan studinya pada proses politik lokal atau dinamika demokratisasi lokal, yakni bagaimana aktor-aktor lokal, secara individual maupun kolektif, mengembangkan atau merusak prinsip-prinsip dan lembaga-lembaga demokratis (Choi, 2011). Secara umum studi tersebut bertumpu pada kompetisi di antara para elite politik di tengah ironi demokrasi ketika pemerintahan oleh rakyat tetapi kelangsungan hidupnya bertumpu pada bahu elite. Dengan kata lain, dalam praktiknya demokrasi sering berarti persaingan bebas di antara calon pemimpin untuk mendapatkan suara pemilih.

Walau demikian, Choi menolak apabila asumsi demikian dipandang sinis, ketika mengarahkan penelitiannya pada bagaimana kontestan lokal merespons eksperimen Pemilu lokal (desentralisasi Pemilu) di Indonesia. Dipilihnya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Kepulauan Riau, Kota Batam, Kota Depok dan Kabupaten Banyuwangi, menurut catatan Choi, selain masing-masing memiliki signifikansi terhadap perdebatan tentang Pemilu lokal dan demokrasi, juga memiliki sejarah pola perkembangan politik lokal di Indonesia pasca-Soeharto. Mengingat luasnya wilayah Indonesia yang memiliki keragaman warna politik, ekonomi, dan sosial budaya maka menarik kesimpulan yang berlaku umum merupakan pekerjaan yang sulit. Namun demikian Choi yakin bahwa studi-studi kasus yang dilakukannya dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman konteks perubahan kelembagaan politik dan pemerintahan di Indonesia (Choi, 2011).

Studi lain yang relevan dengan kepentingan tersebut telah dilakukan oleh sejumlah ilmuwan politik yang kemudian dihimpun oleh Nordholt dan Van

Klinken (2007). Studi mereka menelaah dinamika politik lokal pasca-Orde Baru dengan contoh-contoh kasus dinamika desentralisasi politik di Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Luwu, Kabupaten Tana Toraja dan Wajo (Provinsi Sulawesi Selatan), Kabupaten Bangka, Provinsi Banten, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kabupaten Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sumatera Barat, dan Provinsi Papua.

Serupa dengan studi tersebut, Hadiz (2010) juga mengupas tentang kecenderungan-kecenderungan politik lokal pasca-Orde Baru dengan mengedepankan perspektif sosiologi politik yang memotret perilaku politik elite dalam arena kontestasi politik yang melibatkan banyak aktor yang bermain. Di satu sisi memang terpotret betapa demokrasi di Indonesia memiliki peluang dalam pengakarannya di tingkat lokal, tetapi Pemilu pada langsung diikuti oleh fenomena merebaknya politik uang dan premanisme (*thuggery*) (Hadiz, 2010).

Selain kajian tersebut masih ada juga tulisan-tulisan sejenis yang dapat dibaca dalam Mar'iyah dan Suwarso (2013) yang menggambarkan perkembangan otonomi daerah di Indonesia. Di samping itu, sebagai pembandingan dapat dilihat juga penelitian Hidayat (2007) yang memusatkan perhatian pada tata kelola pemerintahan daerah yang bersih.

2.2. Tinjauan Teoritis

Creswell (2009) menegaskan bahwa teori digunakan sebagai pedoman untuk memahami fenomena dan permasalahan penelitian yang akan dikaji lebih lanjut. Tinjauan teoritis juga bermanfaat untuk membangun kerangka konseptual yang hendak diterapkan dalam penelitian lapangan. Dengan demikian peneliti dituntut untuk menggali perspektif teoritis secara mendalam dan merekonstruksi sebuah kerangka konsep penelitian.

Tinjauan teoritis pada Bab II ini akan diawali dengan telaah ulang (*review*) temuan-temuan penting pada penelitian sejenis terdahulu yang secara umum bersinggungan dengan tema penelitian ini. Sumber-sumber *review* penelitian terdahulu terutama diperoleh dari berbagai tulisan yang relevan dalam jurnal-jurnal ilmiah, buku-buku, dan disertasi yang dipandang relevan. Tujuannya terutama adalah untuk mengetahui posisi akademis peneliti dan sekaligus perbedaan penting penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga ketika penelitian ini menghasilkan temuan-temuan utama maka posisi akademis peneliti pun menjadi jelas apabila dibandingkan dengan peneliti-peneliti lainnya.

Setelah tahap itu maka tahap selanjutnya adalah menguraikan tinjauan teoritis yang bertolak dari pemahaman terhadap hakikat demokrasi politik yang pada praktiknya terdiri dari dua jenis pendekatan, yakni demokrasi langsung (*direct democracy*) dan tidak langsung (*indirect democracy*). Demokrasi langsung tampak pada Pemilu yang membuka ruang bagi rakyat untuk berpartisipasi secara langsung dalam memilih para wakilnya. Dalam konteks inilah kerangka teori studi ini mengaitkan demokrasi langsung dalam perspektif politik lokal. Selanjutnya,

hal-hal yang relevan untuk diuraikan dalam kerangka teori studi ini adalah teori yang terkait tentang Pemilukada dan perilaku pemilih (*voting behavior*).

2.3. Teori Perilaku Pemilih

Pada dasarnya perilaku pemilih dalam sebuah kompetisi politik ditentukan oleh banyak faktor. Pemilih memiliki referensi-referensi yang berbeda dalam menentukan pilihan. Referensi-referensi tersebut bisa berhubungan dengan internal kejiwaan psikologi pemilih atau faktor eksternal yang berasal dari luar diri pemilih. Referensi yang berasal dari internal diri pemilih pada umumnya merujuk pada pendekatan-pendekatan psikologis, yaitu suatu model perilaku pemilih yang didorong berdasarkan pandangan penilaian dan keputusan yang diambil karena faktor-faktor psikologi (Antunes, 2010).

Sedangkan faktor-faktor eksternal yang berasal dari luar diri pemilih pada umumnya berhubungan dengan faktor-faktor relasi sosial, hubungan antara satu orang dengan orang lain, hubungan yang bersifat sosiologis, atau faktor-faktor yang bersifat stimulus ekonomi. Stimulus ekonomi dapat berbentuk uang, barang material, atau *prestise* dan fasilitas. Stimulus ekonomi juga memperkuat teori *public choice* yang menyatakan bahwa rangsangan-rangsangan kenikmatan materialistik menjadi acuan utama para perilaku pemilih (Antunes, 2010).

Dalam rangka menunjukkan urgensi penelitian ini dalam peta keilmuan maka berikut ini disajikan rujukan dari artikel jurnal yang mempunyai kesesuaian dengan penelitian ini. Ada beberapa hal penting yang dapat digali dan dibandingkan dari rangkuman jurnal di bawah ini sebagai rujukan menunjukkan

State of The Art Perilaku Pemilih dalam Pemilu. Berikut ini beberapa jurnal yang menjadi perbandingan topik penelitian.

State of the art Model Sosiologis

No	Tahun	Judul dan Pengarang	Deskripsi
1.	2016	<i>Homo Ludens : Social rationality and political behavior.</i> Herbert Gintis (Santa fe Institute USA).	Pertahanan yang paling sederhana dari demokrasi politik didasarkan pada pilihan demokrasi. Pilihan rasional memberi orang kekuatan dalam kehidupan paralel publik untuk yang diberikan oleh pasar dalam kehidupan pribadi: kekuatan untuk mengubah preferensi mereka sebagai konsekuensi sosial. Namun, model pilihan rasional dari perilaku pemilih secara dramatis di bawah memprediksi partisipasi pemilih di semua tapi pemilihan terkecil. Fiorina (1990) menyebutnya "paradoks yang memakan teori pilihan rasional." Anomali ini adalah inti dari kritik Green dan Shapiro (1994) terkait metodologi pilihan rasional dalam teori politik. Makalah ini mengusulkan sebuah bentuk rasionalitas sosial yang memperkuat model aktor rasional klasik. Konsep ini menjelaskan banyak pusat ketentuan statistik mengenai jumlah pemilih dan ketentuan historis tentang tindakan kolektif.
2.	2015	<i>The Effects of Political Behavior on the Level of Reaching Individual Career Goals in Business.</i> Prof.Dr. Tahir Akgemci Sekuk University Faculty of Economics and Administrative Science Lecrurer S. Gokce Gok	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap hubungan antara perilaku politik, dan tingkat karir individual. Pada konteks ini, kuesioner dilakukan pada 75 karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan IT di Ankara. Data yang diperoleh

		Gazi University.	Dianalisis dengan menggunakan software SPSS 15.0. Menurut temuan hubungan antara perilaku politik, dan tingkat karir individual telah diidentifikasi.
3.	2013	<i>A New Space for Political Behavior : Political Social Networking and its Democratic Consequences.</i> Leticia Bode (George University, Washington DC) Emily K. Vraga George Mason University, Fairfax, VA Porismita Borah (Washington State University) Pullman, WA-Dhavan V. Shah (University of Wisconsin-Madison) <i>Journal of Computer-Mediated Communication (2013)</i>	Situs jaringan sosial (SNS) saat ini membanggakan bahwa lebih dari setengah miliar penggunanya aktif di seluruh dunia, mayoritas adalah orang-orang muda. Penelitian ini mengembangkan penelitian tentang SNS dengan mengkaji baik apa yang mendorong orang untuk mengekspresikan diri secara politik dalam bidang ini, dan apa efek dari pernyataan mungkin pada pertanyaan klasik partisipasi politik. Pengujian proposisi bahwa penggunaan SNS secara politik di kalangan remaja menawarkan jalur baru untuk partisipasi politik mereka menggunakan hirarki linier regresi dan analisis data panel. Hasil menunjukkan bahwa tingkat penggunaan SNS politik berdampak sangat baik dan pertumbuhan dalam partisipasi politik tradisional selama pemilu 2008.
4.	2013	<i>Does Cultural Exposure Partially Explain the Association Between Personality and Political Orientation?</i> Xiaowen, Raymond A. Mar and Jordan B Peterson.	Perbedaan orientasi politik sebagian berakar dalam kepribadian, dengan liberalisme yang diperkirakan oleh Keterbukaan ke Pengalaman dan konservatisme oleh Conscientiousness. Sejak Keterbukaan secara positif terkait dengan kegiatan intelektual dan kreatif, ini mungkin membentuk orientasi politik. Kami

			<p>memeriksa apakah paparan kegiatan budaya dan pengetahuan sejarah memediasi hubungan antara kepribadian dan orientasi politik. Secara khusus, kami meneliti peran paparan Media cetak (Studi 1), paparan Film (Studi 2), dan pengetahuan tentang Sejarah Amerika (Studi 3). Studi 1 dan 2 menemukan bahwa media cetak dan film yang dimediasi hubungan Keterbukaan untuk Pengalaman dan Conscientiousness memiliki dengan orientasi politik. Pada Studi 3, pengetahuan tentang sejarah Amerika dimediasi hubungan antara Keterbukaan dan orientasi politik, tapi bukan hubungan antara Conscientiousness dan orientasi politik. Paparan budaya, dan konsekuensi dari paparan ini dibentuk melalui pengetahuan, oleh karena itu sebagian menjelaskan hubungan antara kepribadian dan orientasi politik.</p>
4.	2012	<p><i>Political Ideology as motivated social cognition: Behavioral and neuroscientific evidence.</i> John T Jost David M Amodio (Department of Psychology, New York University).</p>	<p>Ideologi adalah kekuatan motivasi kuat; manusia adalah makhluk yang mampu melakukan kekejaman (serta tindakan kemurahan hati dan keberanian) dan mengorbankan bahkan hidup mereka sendiri demi sistem kepercayaan abstrak. Pada artikel ini, kami merangkum prinsip utama dari model ideologi politik sebagai kognisi sosial termotivasi (Jost et al. di Psychol Bull 129: 339-375, 2003a, Psychol Bull 129: 389-393,</p>

			2003b, Person Soc Psychol Bull 33: 989-1007 2007), berfokus pada epistemik, eksistensial, dan motif relasional dan implikasinya untuk orientasi politik kirikanan (atau liberal-konservatif).
5.	2011	<p><i>Political orientations, intelligence and education.</i> Heiner Rindermann, Carmen Flores-Mendoza, Michael A. Woodley Chemnitz University of Technology Germany University Federal de Minas Gerais, Brazil Ross University Medical School, Dominica.</p>	<p>Ilmu-ilmu sosial secara tradisional mengasumsikan bahwa pendidikan adalah penentu utama perilaku dan orientasi politik warga. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa intelegensia memiliki pengaruh. Menurut sebuah teori yang mengkonseptualisasikan intelegensia sebagai fenomena penduduk kota (kelas menengah, sipil) harus mempromosikan sikap sipil, kebiasaan dan norma-norma seperti ketekunan, ketertiban dan kebebasan, yang pada gilirannya menumbuhkan perkembangan kognitif - orientasi politik harus berkaitan dengan intelegensia, dengan individu yang lebih cerdas cenderung ke arah orientasi politik kurang ekstrim. Hasil ini dibahas dalam konteks hasil dari penelitian lain dinegara yang berbeda dan dalam konteks model teoritis yang berbeda tentang hubungan antara sikap politik dan IQ.</p>
6.	2008	<p><i>A New Space for Political Behavior : Political Social Networking and its Democratic Consequences.</i> Leticia Bode (George University, Washington DC) Emily K. Vraga George Mason University, Fairfax, VA Porismita Borah</p>	<p>Situs jaringan sosial (SNS) saat ini membanggakan bahwa lebih dari setengah miliar pengguna aktif di seluruh dunia, mayoritas yang orang-orang muda. Penelitian ini memperluas penelitian tentang SNS dengan memeriksa baik apa</p>

		(Washington State University) Pullman, WA Dhavan V. Shah (University of Wisconsin-Madison)	yang mendorong orang untuk mengekspresikan diri secara politik dalam bidang ini, dan apa efek seperti Ekspresi mungkin pada pertanyaan klasik partisipasi politik. Pengujian proposisi bahwa politik penggunaan SNS di kalangan remaja menawarkan jalur baru untuk partisipasi politik mereka menggunakan hirarki regresi linier dan analisis data panel. Hasil menunjukkan bahwa tingkat penggunaan SNS politik berdampak sangat baik dan pertumbuhan dalam partisipasi politik tradisional selama pemilu 2008.
7.	2008	<i>Partisans Without Constraint: Political Polarization and Trends in American Public Opinion</i> Delia Baldassarri (Princeton University) Andrew Gelman (Columbia University) <i>AJS Volume 114 Number 2 (September 2008): 408–46</i>	Menggunakan data NES1972-2004, model dalam masalah <i>partisanship</i> -korelasi sikap masalah dengan identifikasi-partai dan masalah partai keselarasan-korelasi antara pasangan isu-dan secara substantif menemukan peningkatan masalah keberpihakan, tapi sedikit bukti dari masalah penjajaran. Temuan menunjukkan bahwa kesesuaian perubahan opini beralih dari label partai antara pemilih daripada sikap menjadi masalah yang lebih besar: karena pihak lebih terpolarisasi, mereka sekarang lebih baik memilah individu sepanjang garis ideologis. Tingkat kendala bervariasi di seluruh subkelompok populasi: partisan yang kuat dan pemilih yang kaya dan politik yang canggih telah tumbuh lebih koheren dalam keyakinan mereka. Para

			penulis membahas konsekuensi dari partisan penataan kembali dan kelompok sortasi pada proses politik dan potensi penyimpangan dari pluralistik klasik politik Amerika
8.	2008	<i>Political Behavior and Candidate Emergence In the Hmong-American Community.</i> Steven Doherty, Ph.D (Assistant Professor, Dickinson State University) <i>Hmong Studies Journal 8: 1-35</i>	Penelitian ini berfokus pada faktor-faktor sosial, budaya dan politik yang telah membentuk perilaku politik Hmong-Amerika di Amerika Serikat dan juga lebih khusus pada masalah Hmong-Amerika kandidat yang telah mencalonkan diri untuk jabatan pemilu. pemilih pemilu dan arah partisan dari Hmong-Amerika pemilih akan menerima beberapa pemeriksaan umum. Perhatian khusus juga diberikan kepada munculnya calon secara cepat luar biasa untuk kantor pemilihan dari komunitas Hmong-Amerika di Upper Midwest, dan motivasi dan strategi tertentu calon kandidat Hmong-Amerika.
9.	2007	<i>Beyond the self : Social identity, altruism and political participation.</i> James H. Fowler (university of california, san Diego). Cindy D. Kam University of California Davis. <i>The Journal of Politics, Vol. 69, No. 3, August 2007, pp. 813-827</i>	Para ilmuwan baru-baru ini memperpanjang kalkulasi model partisipasi tradisional dengan menambahkan unsur manfaat kepada orang lain. Kami menemukan studi ini dengan membedakan secara teoritis kepedulian terhadap orang lain pada umumnya (altruisme) dari kepedulian orang lain dalam kelompok-kelompok tertentu (identifikasi sosial). Kami mengandaikan bahwa kedua bentuk kepedulian menghasilkan manfaat berupa peningkatan partisipasi. Untuk menguji teori ini, kita

			<p>menggunakan alokasi dalam permainan diktator menuju penerima anonim tak dikenal dan dua penerima diidentifikasi hanya sebagai Demokrat atau Republik. Alokasi ini mengizinkan perbedaan antara altruisme dan identifikasi sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik altruisme dan identifikasi sosial secara signifikan meningkatkan partisipasi politik. Hasil penelitian juga menunjukkan kegunaan menggabungkan manfaat yang berasal dari sumber-sumber di luar materi menjadi model partisipasi pilihan rasional</p>
10.	2007	<p><i>Differences in political participation between young and old people.</i> Ellen Quintelier Catholic University of Leuven Belgium. <i>Contemporary Politics, Volume 13, Number 2, June 2007</i></p>	<p>Sebuah tinjauan dari analisis kuantitatif menunjukkan bahwa cara orang muda memandang politik sebenarnya mirip dengan apa yang menggambarkan teori. Secara literer, meskipun menitikberatkan pada efek siklus hidup banyak mengakibatkan perbedaan dalam menentukan pilihannya, mereka hanya dapat menjelaskan perbedaan kecil dalam partisipasi politik. Perbedaan besar dalam partisipasi politik dijelaskan oleh tingkat pencapaian pendidikan. Kedua, orang-orang muda benar-benar terlibat dalam lainnya, bentuk baru partisipasi, yang meliputi mengenakan, dan melakukan penandatanganan petisi. Meskipun ini hanya sebuah contoh kecil, bahkan di sini kita menemukan perbedaan antara kaum muda dan generasi tua. Ketiga, orang-orang muda merasa</p>

			berlebihan. Penelitian menunjukkan bahwa orang-orang muda tidak berbeda jauh sehubungan dengan tingkat mereka partisipasi politik jika dibandingkan dengan orang yang lebih tua, terutama ketika faktor lain diperhitungkan. Demikian pula, orang-orang muda dan orang tua menampilkan tingkat yang sebanding kepercayaan di lembaga-lembaga politik dan kepentingan politik.
11.	2005	<p><i>Metropolitan Latino Political Behavior: Voter Turnout and candidate preference in Los Angeles.</i></p> <p>Matt. A. Barreto (University of California), Irvine Mario Villarreal (Claremont Graduate University) Nathan D. Woods Welch Consulthing</p>	<p>Kebanyakan penelitian tentang perilaku pemilih Etnis Latin secara yakin menemukan bahwa sebagai sebuah kelompok, suara pemilih Latin berada pada tingkat lebih rendah dari kelompok ras dan etnis lainnya di Amerika Serikat. Di dalam artikel, diungkapkan bahwa mengingat keadaan yang tepat, Pemilih Latin diharapkan memberikan hak pilih di tingkat lebih tinggi dari kelompok ras dan etnis lainnya. Secara khusus, kita berpikir kehadiran Calon kandidat etnis latin yang layak akan memacu peningkatan jumlah pemilih Latin dan bahwa ketika calon kandidat Latin mencalonkan diri, pemilih Latin akan lebih memilih calon sesama etnis. Untuk pertama kalinya di Los Angeles, pemilihan walikota 2001 disaksikan pemilih Latin dan memperoleh suara pada level tertinggi dari setiap kelompok ras atau etnis di kota.</p>
12.	2002	<p><i>Traditional Orientations and Political Participation in Three</i></p>	<p>Berdasarkan tiga sampel survei berskala besar di</p>

		<p><i>Chinese Societies.</i> Kuan Hsin-Chi and Lau Siu Kai (Department of Government and Public Administration University of Hongkong)</p>	<p>daratan Cina, Taiwan dan Hong Kong, Penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan hubungan antara orientasi politik tradisional dan partisipasi politik. Temuan yang ada bahwa di antara ketiga masyarakat, Cina di daratan yang paling tradisional. Secara umum, dampak negatif dari orientasi politik tradisional di partisipasi politik kecil sekali pendidikan dikuasai. Secara khusus, berdasarkan Partisipasi politik, di Hong Kong lebih individual terutama difasilitasi oleh tekanan modernisasi. Di Taiwan, faktor kelembagaan seperti demokrasi, pemilu dan asosiasi sipil adalah hal yang terpenting dan ditopang oleh meningkatnya kelas kerah putih. Pada China Daratan, orientasi politik tradisional berdampak positif pada tingkat partisipasi ini dan dampak tetap sama bahkan setelah menguasai pendidikan. Dampak positif dapat dijelaskan oleh gangguan institusional dimana orientasi politik tradisional mengerahkan pengaruh berbeda pada modus partisipasi yang berbeda : kampanye negatif dan kegiatan demonstrasi tetapi positif pada aktifitas pemilihan, kampanye dan daya tarik. Temuan dari penelitian ini menyiratkan bahwa argumen bahwa budaya politik Konfusianisme mustahil membuat Cina yang demokratis akan menjadi mentah dan tidak relevan.</p>
--	--	---	--

13.	1981	<p><i>Personality and Elite Political Behavior: The Influence of Self Esteem on Judicial Decision Making</i> James L. Gibson <i>The Journal of Politics</i>, vol.43, no.1 (Februari 1981), 104-125</p>	<p>Penelitian ini menguji serangkaian hipotesis teoritis tentang dampak kepribadian atribut "harga diri" pada pengambilan keputusan dalam lembaga-lembaga politik. Menggunakan model teoritis peran pengambilan keputusan, efek yang agak tidak langsung, namun demikian kuat, harga diri pada perilaku pengambil keputusan diidentifikasi. Model ini kemudian diuji dengan menggunakan data yang dikumpulkan melalui wawancara dengan sampel hakim California.</p>
-----	------	--	---

State of the art Model Psikologis

No	Tahun	Judul dan Pengarang	Deskripsi
1.	2016	<p><i>Distribution Preferences and Political Behavior.</i> Raymon Fisman, Pamela Jakiela, and Shachar Kariv.</p>	<p>Kami menguraikan preferensi distribusi ke <i>fair-mindedness</i> (condong pada diri sendiri vs orang lain) dan timbal balik kesetaraan, dan mengukur efisiensi baik pada tingkat individu dalam sampel yang besar dan beragam di Amerika. Kami menemukan heterogenitas yang cukup baik pada tingkat adil-pikiran dan kemauan untuk trade off kesetaraan dan efisiensi, banyak yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel sosial ekonomi atau demografi standar. Subyek pengorbanan kesetaraan efisiensi memprediksi keputusan politik mereka: kesetaraan berfokus pada kemungkinan</p>

			Subyek mungkin lebih memilih Barack Obama, dan berafiliasi dengan Partai Demokrat. Temuan kami menjelaskan bagaimana pemilih Amerika termotivasi oleh distribusi preferensi mereka.
2.	2015	<p><i>Political Efficacy, Voting Behavior and Partisanship among University Students</i> Dr. Ahmed M. Helal- Dr. Eid G. Abo Hamza, Department of Mental Health Faculty of Education, Tanta University Egypt</p> <p>International Journal of Humanities and Social Science Vol. 5, No. 9(1); September 2015, pp.300-315 http://www.ijhssnet.com/journals/Vol_5_No_9_1_September_2015/30.pdf</p>	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara efikasi politik, perilaku pemilih dan keberpihakan di kalangan mahasiswa. 255 mahasiswa pasca sarjana menjawab skala laporan diri yang dinilai adalah efikasi politik, perilaku memilih dan keberpihakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada korelasi antara efikasi politik, perilaku pemilih, dan korelasi antara keberpihakan dan perilaku pemilih. Hasil ini juga menunjukkan bahwa efikasi politik dan keberpihakan adalah kuat memprediksi perilaku pemilih. Akhirnya, tidak ada perbedaan jenis kelamin dalam hal efikasi politik, perilaku pemilih dan keberpihakan.
3.	2014	<p><i>Model of Voting</i> Doc. Dr. Kire Sarlamanov International Balkan University Skopje Macedonia Doc. Dr. Aleksandar Jovanoski University SS. Kliment Ohridski, Faculty of Law-Kicevo, Macedonia</p> <p><i>Researcher's World -Journal of Arts, Science & Commerce</i> Vol.- V, Issue – 1, Jan. 2014 [16]</p>	Partai politik yang bersaing dalam pemilu sering mempromosikan dirinya melalui konsep afirmasi politik untuk pengembangan masyarakat. Diharapkan, dalam fungsi mereka, melalui ideologi tekad dan landasan institusional, partai

		<p>politik mengekspresikan perbedaan secara serius, terutama dalam hal nilai-nilai yang mereka mendasarkan kebijakan publik mereka, perspektif untuk pengembangan masyarakat dan bidang sosial yang terpisah. Dengan ini menjadi bahan pertimbangan, politik di satu pihak juga berbeda sesuai dengan kredibilitas yang mereka nikmati di masyarakat. Namun, ketika membuat keputusan yang pihak untuk memberikan suara mereka dalam pemilu, warga dipandu oleh motivasi yang berbeda. Beberapa sudut pandang mendominasi dalam teori pemungutan suara yang mencoba untuk menjelaskan perilaku pemilih dalam pemilu. Teks ini bertujuan untuk sintesis kognisi ditawarkan dalam teori pemungutan suara dan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: Mengapa beberapa warga melakukan voting? Mengapa dia memilih untuk satu pihak dan bukan untuk partai politik lain? Mengapa sebagian besar warga memilih partai politik tertentu dan bukan untuk yang lainnya? Apakah mereka melakukan ini karena mereka termasuk kelompok sosial</p>
--	--	---

			tertentu, lapisan sosial, agama.
4.	2011	<p><i>Individual Political Behavior in Organizational Relationship</i> Abdul Latif Department of Management Sciences, Abbasia Campus The Islamia University of Bahawalpur, Punjab, Pakistan Zain Ul Abideen (Corresponding author) Department of Management Sciences, Abbasia Campus The Islamia University of Bahawalpur, Punjab, Pakistan Muhammad Suhail Nazar Department of Management Sciences, Abbasia Campus The Islamia University of Bahawalpur, Punjab, Pakistan Journal of Politics and Law Vol. 4, No. 1; March 2011</p>	<p>Tulisan ini mencoba untuk menjelaskan perilaku politik individu dalam organisasi. Hal ini juga menunjukkan bahwa sebagai Teori mengabaikan perilaku politik individu dalam organisasi, sehingga, perilaku politik individu dalam konteks organisasi yang dieksplorasi menggunakan tiga dimensi utama perilaku politik: internal-eksternal, vertikal-lateral dan sah-sah. Pola berdasarkan dimensi ini diusulkan dengan demikian menyimpulkan bahwa individu melakukan politik praktis untuk berbagai alasan misalnya listrik, sumber daya, pengetahuan, wewenang dan pengamanan posisi mereka.</p>
5.	2010	<p><i>Theoretical models of voting Behavior.</i> Rui Antunes Escola Superior de educacao-instituto politecnico de coimbra.</p>	<p>Artikel ini meninjau model teoritis utama yang menjelaskan perilaku pemilih - Model sosiologis perilaku pemilih, Model psikososial perilaku pemilih dan teori pilihan rasional -, menekankan kontinuitas dan saling melengkapi teoritis di antara mereka. Hal ini juga mengusulkan konseptualisasi dari konsep keberpihakan di untuk mengintegrasikan semua kontribusi yang</p>

			relevan dari tiga model utama perilaku pemilih dalam pendekatan holistik untuk perilaku pemilu.
6.	2009	<p><i>Political Orientation and Ideological Inconsistencies: (Dis)comfort with Value Tradeoffs</i></p> <p>Clyton R. Critcher-Michaela Huber Arnold K.Ho-Spassena P.Koleva.</p>	<p>Orang sering tidak konsisten dalam cara mereka menerapkan nilai-nilai mereka untuk mereka keyakinan politik (misalnya, mengutip nilai kehidupan dalam menentang hukuman mati sementara secara bersamaan mendukung hak aborsi). Bagaimana orang menghadapi inkonsistensi tersebut? Liberal lebih mungkin untuk mengatakan bahwa isu-isu yang bisa menarik beberapa nilai-nilai bersaing isu-isu kompleks yang diperlukan pengorbanan nilai, sedangkan konservatif lebih cenderung untuk menolak banding dari masalah. Kami berdebat bahwa perbedaan ini berakar pada cara yang berbeda yang liberal dan konservatif mewakili isu-isu politik. bukti tambahan menyarankan bahwa konservatif 'yang lebih tinggi perlu untuk penutupan membawa mereka untuk mewakili masalah dalam hal yang menonjol, nilai-nilai diakses.</p> <p>Meskipun ini dapat menyebabkan sikap konservatif 'untuk menjadi lebih situasional lunak dalam kondisi</p>

			<p>tertentu, perubahan seperti itu berfungsi melindungi pendekatan absolut untuk seseorang nilai-nilai moral dan bantuan konservatif untuk menolak banding yang berpotensi posisi tidak konsisten.</p>
7.	2004	<p><i>Determining Effect of Personality Traits on Voter Behavior Using Five Factor Personality inventory.</i> Ceyhan Aldemir - Giil Bayraktaroglu. Journal of Faculty of Business, Vol. 5, No. 2, 2004 – No.1, 2005 http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423876059.pdf</p>	<p>Para peneliti telah menggunakan empat sub-dimensi (aturan kepatuhan, inovasi, reaktivitas dan percaya diri) dari persediaan kepribadian lima faktor dipugar dan dimodifikasi oleh Somer, Korkmaz dan Tatar (2002) untuk warga Turki untuk menganalisis interaksi kepribadian dan perilaku pemilih. Niat diperiksa sebagai niat untuk kelompok tertentu pihak: kiri, benar, baru, baru dan agama. Aturan ketaatan ditemukan untuk membuat perbedaan yang signifikan antara niat responden untuk memilih orientasi politik tertentu. Pengaruh demografi variabel (usia, jenis kelamin dan pekerjaan) pada kepribadian sub-dimensi dan niat (Bersama-sama dengan ciri-ciri kepribadian) diperiksa. Umur ditemukan memiliki interaksi dengan aturan ketaatan, inovasi dan kepercayaan diri saat gender dan pekerjaan memiliki interaksi</p>

			hanya dengan percaya diri. Ketiga faktor demografi mampu menjelaskan niat pemilih tergantung pada orientasi politik mereka.
8.	1982	<p><i>Diffuse Political Support and Antisystem Political Behavior: A Comparative Analysis</i> Edward N. Muller, Thomas O. Jukam, Mitchell A. Seligson. <i>American Journal of Political Science</i>, 26 (May, 1982), pp. 240–264.</p>	<p>Difusi dukungan politik merupakan konsep imorant dalam ilmu politik karena relevansi teoritis untuk stabilitas sistem politik. Signifikansi makro tersebut didasarkan pada asumsi bahwa, pada tingkat mikro, dukungan menyebar untuk sistem politik memiliki konsekuensi perilaku. Penelitian ini melakukan perbandingan nasional lintas dari hubungan antara ukuran antisystem perilaku politik dan dua indikator dari dukungan politik difusi, (1) Trust terkenal di index Pemerintah dan (2) skala Politik Support Keterasingan. Kepercayaan dalam indeks pemerintah ditemukan menderita keandalan rendah dan menanggung tidak ada hubungan dengan ukuran antisystem perilaku dalam sampel probabilitas dewasa dari kota New York dan kota Kosta Rika dan sampel purposive warga kelas menengah dari Guadalajara, Meksiko. Sebaliknya, skala Dukungan-Keterasingan Politik menunjukkan hubungan yang konsisten besarnya moderat dengan</p>

			antisystem behavior di semua tiga sampel. Relevansi perilaku dukungan politik difusi demikian tergantung pada sekarang konsep yang didefinisikan secara operasional.
9.	1971	<i>Political Orientation and Riot Participation</i> Jeffery M. Paige American Sociological Review Vol. 36, No. 5 (Oct., 1971), pp. 810-820	Menganalisis hubungan antara kepercayaan politik, keberhasilan politik dan partisipasi demonstrasi melalui survei terhadap 237 pria kulit hitam di Newark, NJ. Diperbandingkan dengan aktivis hak-hak sipil dan para pemilih, demonstran memiliki kesamaan dalam hal informasi politik namun memiliki kepercayaan rendah terhadap pemerintah.

State of the art Model Rasional/Ekonomi

No	Tahun	Judul dan Penulis	Deskripsi
1.	2016	<i>Income inequality and election outcomes in OECD countries; new evidence following the great recession of 2008-2009.</i> Florence Bouvet, Economics Department, Sonoma State University, 1801 E. Cotati Avenue, Rohnert Park, CA 94928, USA Sharmila King Economics Department, University of the Pacific, 3601 Pacific Avenue, Stockton, CA 95211, USA <i>Electoral Studies 41 (2016) 70-79</i>	Dalam jurnal ini mengkaji bagaimana pemilih menggunakan kinerja ekonomi untuk menetapkan akuntabilitas pemilu bagi partai berkuasa pada pemilihan legislatif untuk negara-negara OECD. Menggunakan data pada hasil pemilihan legislatif nasional di 32 negara OECD 1975-2013. Berfokus pada relevansi ketimpangan pendapatan yang telah muncul kembali ke garis depan debat publik sejak krisis ekonomi global terakhir. Selain itu, penelitian ini menguji kembali apakah

			<p>tingkat kinerja ekonomi bervariasi dengan orientasi politik pemerintah sebelumnya (petahana). Di akhir, penelitian ini mengkaji apakah Masa Resesi Besar 2008-2009 mengubah tingkatan sejauh mana pemilih terus memilih petahana, khususnya pihak kiri, yang bertanggungjawab atas buruknya kinerja ekonomi dan meningkatnya ketimpangan/ketidaksetaraan. Temuan dari penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi merupakan variabel paling kuat untuk pilihan ekonomi/rasional, sebelum dan sesudah masa resesi besar. Pangsa pasar untuk partai berhaluan kiri menurun ketika ketimpangan pendapatan meningkat selama pertumbuhan ekonomi normal. Namun, pemilih lebih cenderung untuk memilih partai berhaluan kiri yang mapan jika ketimpangan pendapatan domestik dan tingkat pengangguran naik sebelum masa Resesi Besar.</p>
2.	2014	<p><i>Macroeconomics, Economic Crisis and Electoral Outcomes: A National European Pool</i> Ruth Dassonneville University of Leuven Michael S. Lewis-Beck- University of Iowa <i>Acta Politica (2014) 49, 372–394.</i></p>	<p>Banyaknya penelitian survei komparatif telah membentuk kehadiran voting ekonomi sebagai kekuatan individu dalam pemilu Eropa. Tapi hipotesis pemungutan suara ekonomi pada tingkat agregat, dengan makroekonomi yang mempengaruhi hasil pemilu secara</p>

			<p>keseluruhan, terletak pada pijakan bergoyang. Memang, mungkin ada kekeliruan mikrologikal di tempat kerja dengan pilihan ekonomi tiap individu tidak menambahkan efek elektoral secara nasional sama sekali. Penelitian mengenai kemungkinan ini melalui analisis yang ketat dan besaran rentetan waktu kumpulan data silang sektoral negara-negara Eropa. Dari hasil ini, menjadi jelas bahwa ekonomi makro menggerakkan pemihan umum, dengan memberi sanksi pada pihak penyelenggara (pemerintah) dan menghargai mereka. Pertanyaannya adalah apakah keterkaitan pilihan ekonomi ini mengubah krisis ekonomi. Temuan menunjukkan bahwa dalam krisis ekonomi secara umum, didefinisikan sebagai pertumbuhan negatif, memperkuat suara ekonomi nasional, terutama di negara-negara berkembang dari Eropa Selatan. Di negara-negara ini, di bawah krisis, pihak yang berkuasa masih lebih bertanggungjawab di bilik pemilihan (kotak suara) jika dibandingkan dengan rekan-rekan Eropa Utara mereka.</p>
3.	2012	<p><i>PIGS or not? Economic voting in Southern Europe.</i> Michael S, Lewis-Beck, Richard Nadeau, Department of Political Science, University of Iowa, USA,</p>	<p>Voting ekonomi sedikit dipelajari di negara-negara Eropa Selatan. Di sini kita mengkaji voting ekonomi di negara-negara</p>

		<p>Department of Political Science, University of Montreal, USA. <i>Electoral Studies, Vol.31, No.3, September 2012, pp.472-477.</i></p>	<p>Eropa Selatan dari Portugal, Italia, Spanyol, dan Yunani - PIGS. Melalui analisis dari sepuluh kelompok survei bangsa yang besar, Eropa, ditetapkan bahwa pemungutan suara ekonomi ada di PIGS, dengan kekuatan yang secara signifikan melebihi yang di non-PIGS dari Eropa Utara. Penjelasan untuk perbedaan demikian, disarankan, pada umumnya terletak kurang solidnya koalisi pemerintahan dan kinerja ekonomi yang lebih miskin yang menjadi ciri bangsa-bangsa Eropa Selatan. Kekuatan penilaian yang relatif lebih besar dari suara ekonomi pada negara-negara PIGS menyiratkan pemilih mereka akan meminta pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan krisis ekonomi yang sedang mereka hadapi.</p>
4.	2012	<p><i>Economic Crisis and Election-The European Periphery.</i> Paolo Bellucci, Marina Costa Lobo, Michael S. Lewis-Beck</p> <p><i>Electoral Studies</i> Volume 31, Issue 3, Pages 469-471 (September 2012) Special Symposium: Economic Crisis and Elections: The European Periphery</p>	<p>Makalah ini membahas isu akuntabilitas demokratis dan suara ekonomi di pinggiran kota Eropa. Krisis ekonomi yang melanda perekonomian dunia di tahun 2008 telah sangat menantang kapasitas pemerintah untuk mengarahkan perekonomian nasional dan memiliki dampak yang kuat pada dukungan elektoral mereka. Makalah membahas apakah suara ekonomi dan</p>

			akuntabilitas demokratis meningkat atau, di sisi lain, mereka bisa tertekan oleh globalisasi dan oleh pergeseran dari yang berkuasa kompetensi dari nasional ke arena Eropa supranasional.
5.	2012	<p><i>Economic Voting under the Economic Crisis; Evidence from Greece.</i> Roula Nezi, Department of public administration, university of twente, Netherlands. Electoral Studies Volume 31, (2012) Pages 498-505</p>	<p>Setelah bergabung dengan zona euro pada tahun 2001, Yunani mengalami periode singkat euforia ekonomi sebelum menghadapi krisis keuangan besar sekitar 9 tahun kemudian. Pada periode antara bergabung dengan zona euro dan menerima paket <i>bail out</i> bersama dengan IMF/Uni Eropa. Situasi ekonomi yang dihadapi pemilih Yunani berubah secara dramatis. Artikel ini menggunakan sejumlah pengaturan untuk menguji hipotesis voting ekonomi. Menggunakan data agregat membujur 1981-2009, saya menyelidiki hubungan antara indikator ekonomi makro dan berbagi suara dari pihak incumbent untuk menguji "keluhan asimetri" hipotesis. Selain itu, dengan menggunakan Data tingkat individu 2004-2009, saya menyelidiki sejauh mana retrospektif evaluasi sosiotropik tentang keadaan ekonomi yang terkait dengan dukungan untuk pihak <i>incumbent</i>. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi ekonomi sosiotropik terkait</p>

			dengan dukungan partai pemerintah, tetapi dalam periode ketika ekonomi adalah yang terburuk Incumbent tidak memiliki kesempatan nyata untuk menang dan harus mengharapkan dukungan hanya dari pendukung lamanya yang setia.
6.	2012	<p><i>Voting When the Economy Goes Bad, Everyone Is in Charge, and No One Is to Blame: The Case of the 2009 German Election</i></p> <p>Christopher J. Anderson, Jason D Hecht, Department of Government Cornell University. Electoral Studies Volume 31, Issue 1, March 2012,Pages 469-642</p>	<p>Ekonomi adalah isu utama dalam pemilu Jerman 2009. Krisis ekonomi global tidak mengganggu cadangan moneter Jerman, yang perekonomiannya terintegrasi dalam peredaran ekonomi global. Dengan demikian ketika perekonomian Jerman mengalami guncangan, apakah pemilih menghubungkan pandangan mereka mengenai situasi perekonomian dengan pilihan suara mereka? Ataukah mereka, mengakui ketergantungan Jerman di pasar global dan memotong kelonggaran pemerintah, saat negara terdiri dari dua partai besar. Menggunakan survei panel pra dan pasca pemilu dari Studi Pemilu Jerman Longitudinal (GLES), menitikberatkan bahwa pemilih relatif memilih perekonomian, dibandingkan pertimbangan lain saat menyalurkan suara mereka dan apakah menilai pihak yang penyelenggara tidak profesional berdasarkan kondisi perekonomian.</p>

7.	2010	<p><i>The political of inequality: voter mobilization and left parties in advanced industrial states.</i> <i>Jonas Pontusson and David Rueda</i> <i>Comparative Political Studies</i> 2010; 43; (6)675–705 http://users.ox.ac.uk/~polf0050/Rueda%20CPS.pdf</p>	<p>Mengapa beberapa negara telah menyaksikan peningkatan yang signifikan dalam ketidaksetaraan sejak tahun 1960-an sementara pada saat yang sama mengalami sedikit perubahan secara politik dilakukan? Dan mengapa bahwa di negara-negara lain, di mana ketidaksetaraan telah meningkat jauh lebih sedikit, Kiri telah menjadi jauh lebih banyak redistributif? Jawabannya, penulis berpendapat, harus dilakukan dengan interaksi antara ketidaksetaraan dan mobilisasi politik pemilih berpenghasilan rendah. Itu penulis membuat dua poin dalam artikel ini. Pertama, tingginya tingkat ketimpangan bergerak pihak kiri ke kiri. Kedua, meskipun peningkatan ketimpangan mendorong konstituen inti dari pihak Kiri ke kiri, itu juga membuat beberapa individu cenderung untuk terlibat dalam politik. Para penulis berpendapat bahwa pihak Kiri akan menanggapi peningkatan ketidaksetaraan hanya ketika pemilih berpenghasilan rendah secara politik dimobilisasi. Mereka mengeksplorasi klaim ini melalui perbandingan analisis program pihak Kiri di 10 Organisasi</p>
----	------	--	--

			Kerjasama Ekonomi dan negara-negara Pengembangan selama periode 1966-2002.
8.	2008	<p><i>State income inequality and presidential election turnout and outcomess.</i></p> <p>James K. Galbraith and J. Travis Hale Social Science Quarterly Vol. 89, No. 4 (DECEMBER 2008), pp. 887-901</p>	<p>Tujuan. Penelitian ini menguji menghubungkan antara ketimpangan pendapatan, jumlah pemilih, dan pilihan pemilu di tingkat negara bagian dalam pemilihan presiden terakhir. Metode. Kita memperkenalkan dua tingkat negara bagian set data ekologi baru, diperkirakan tahunan koefisien Gini ketidaksetaraan pendapatan 1969-2004 dan ukuran segregasi pendapatan di Sensus traktat dalam negara pada tahun 1999. Kami menguji asosiasi antara ketidaksetaraan, jumlah pemilih, dan preferensi partai dengan cross-sectional, tetap efek, dan multilevel analisis. Hasil. Efek lintas seksi ketimpangan pada kehadiran pemilih dan pilihan pemilu adalah ambigu. Namun, analisis tetap efek menghubungkan tinggi ketimpangan pendapatan untuk partisipasi pemilih rendah dan juga untuk suara Demokrat lebih kuat. Hasil berjenjang menunjukkan bahwa tingkat yang lebih tinggi dari segregasi ekonomi juga yang terkait dengan jumlah pemilih tertekan, setelah mengendalikan karakteristik pemilih</p>

			individu dan untuk tingkat pendapatan negara.
9.	2008	<p><i>Economic Inequality and Democratic Political Engagement</i> Frederick Solt Southern Illinois University. <i>American Journal of Political Science</i> Vol. 52, No. 1 (Jan., 2008), pp. 48-60 http://www.jstor.org/stable/25193796</p>	<p>Adakah efeknya, jika ada, apakah tingkat kesenjangan ekonomi di negara ini pada keterlibatan politik warga negaranya? Penelitian ini menguji pertanyaan ini menggunakan data dari beberapa survei silang-nasional dari negara-negara demokrasi industri maju. Hal itu akan menguji teori bahwa ketimpangan yang lebih besar meningkatkan kekuatan relatif dari orang kaya untuk membentuk politik yang menguntungkan mereka sendiri terhadap argumen saingan yang berfokus pada efek ketimpangan pada kepentingan obyektif warga atau sumber daya yang mereka miliki untuk keterlibatan politik. analisis menunjukkan bahwa tingkat yang lebih tinggi dari ketimpangan pendapatan kuat menekan kepentingan politik, frekuensi diskusi politik, dan partisipasi dalam pemilihan di antara semua tetapi warga paling makmur, memberikan bukti yang meyakinkan bahwa ketimpangan ekonomi yang lebih besar menghasilkan ketimpangan politik yang lebih besar.</p>
10.	2006	<p><i>Economic Voting and Multilevel Governance: A Comparative Individual-Level Analysis</i> Cameron D Anderson. Queen's University. <i>Volume 50, Issue 2 April 2006 Pages</i></p>	<p>Sebuah komponen penting dari dukungan yang berkuasa adalah kalkulus reward / hukuman dari voting ekonomi. pekerjaan</p>

		<p>449–463 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1540-5907.2006.00194.x/abstract</p>	<p>sebelumnya memiliki menunjukkan bahwa "kejelasan tanggung jawab" dalam kondisi pemerintah negara pusat efek ekonomi nasional pada kewajiban pilihan suara: mana kejelasan tinggi (rendah), efek ekonomi yang lebih besar (kurang). Artikel ini kemajuan "kejelasan tanggung jawab" Argumen dengan mempertimbangkan efek dari tata kelola multilevel voting ekonomi. Dalam konteks kelembagaan multilevel pemerintahan, proses benar menugaskan tanggung jawab untuk hasil ekonomi bisa sulit. Artikel ini menguji proposisi yang bertingkat governancemutes efek dari kondisi ekonomi nasional dengan merusak hubungan tanggung jawab kepada pemerintah nasional. Data tingkat-individu dari Studi Banding Pemilihan Sistem Modul 1 digunakan untuk menguji proposisi ini. Hasil menunjukkan bahwa voting ekonomi terlemah di negara-negara di mana pemerintahan bertingkat paling menonjol. Temuan dibahas dalam terang kontribusi untuk literatur voting ekonomi dan implikasi potensial pemerintahan bertingkat.</p>
11.	2005	<i>Political Economic Versus Public Choice Two Views of Political Economy in Competition.</i>	Ekonomi politik seperti Pilihan Publik, didefinisikan sebagai

		Charles B. Blankart and Gerrit B. Koester. Humboldt University Berlin.	<p>analisis ekonomi politik. Tapi pendukungnya mengklaim bahwa ekonomi politik bukan sebagai pelengkap. Tetapi pengembangan dari pilihan publik, sebuah paradigma baru menggantikan pendekatan pilihan publik. Evaluasi yang diperoleh terkait klaim ekonomi politik ini di 3 bidang: siklus bisnis politik, integrasi dan pemisahan diri, serta ekonomi politik secara konstitusional. Temuan yang ada bahwa ekonomi politik memiliki kontribusi substansial untuk masalah yang pertama, tetapi sedikit untuk masalah kedua dan ketiga, di mana hal ini melekat pada dunia perencanaan dan kemurahan hati para diktator. Oleh karena itu paradigma pilihan publik mulai muncul menguat perdebatannya dengan ekonomi politik.</p>
12.	2000	<p><i>Economic voting and political context, a comparative perspective.</i> Christopher J Anderson, Department of political science, Binghamton University. <i>Electoral Studies 19 (2000) 151–170</i></p>	<p>Berdasarkan data survei tingkat individu dikumpulkan di 13 negara demokrasi Eropa, penelitian ini menganalisis tiga cara alternatif pemodelan bagaimana konteks politik mempengaruhi hubungan antara persepsi ekonomi dan niat orang. Ketiga pendekatan ini adalah (1) kelembagaan kejelasan tanggung jawab; (2) mengatur ukuran target partai; dan (3) kejelasan alternatif yang tersedia.</p>

			<p>Hasil menunjukkan bahwa konteks politik berinteraksi dengan persepsi ekonomi mempengaruhi voting tingkah laku. Ketika konteks kelembagaan memperjelas siapa yang bertanggung jawab atas kebijakan, ketika Target kredit dan menyalahkan adalah besar, dan ketika warga memiliki lebih sedikit pilihan alternatif, dampak ekonomi yang kuat. Secara bersama-sama, temuan ini menunjukkan bahwa kemampuan pemilih untuk mengekspresikan ketidakpuasan dengan kinerja ekonomi ditingkatkan dengan mekanisme akuntabilitas sederhana</p>
13.	2000	<p><i>Economic Determinants of Electoral Outcomes</i> Michael S Lewis-Beek, Dept. Political Science Univ of Iowa, Mary Stemaier, Dept. Of Government and Foreign Affairs, University of Virginia <i>Annual Review of Political Science 3 (2000): 183–219.</i></p>	<p>Kondisi perekonomian membentuk hasil pemilihan umum dalam dunia demokrasi. Di kala perekonomian bagus partai pemerintah tetap berkuasa, saat perekonomian buruk mereka tersingkir. Proposisi ini menguat, dalam riset penelitian ditinjau di sini menunjukkan.</p> <p>Temuan di tingkat makro ditujukan pada pemilih ekonomi, yang menuntut pemerintah bertanggung jawab untuk kinerja ekonomi, apakah menguntungkan atau menghukum pemerintah pada kotak pemungutan suara. Meskipun pemilih tidak terlihat secara eksklusif di bidang</p>

			ekonomi, mereka umumnya lebih berat menitikberatkan daripada orang lain, terlepas dari demokrasi mereka memilih dalam.
14.	1995	<i>Economic Growth, Carrying Capacity, and the Environment</i> Kenneth Arrow, Bert Bolin, Robert Costanza, Partha Dasgupta, Carl Folke, C. S. Holling, Bengt-Owe Jansson, Simon Levin, Karl-Goran Maler, Charles Perrings, David Pimentel <i>SCIENCE VOL. 268, 28 APRIL 1995, pp.520-521</i>	Pada artikel ini membahas relasi antara pertumbuhan ekonomi dan kualitas lingkungan dan hubungan antara aktifitas ekonomi dan daya dukung serta ketahanan lingkungan.
15.	1995	<i>Economic Voting and the Welfare State: A Cross-National Analysis</i> Alexander C. Pacek and Benjamin Radcliff <i>The Journal of Politics Vol. 57, No. 1 (Feb., 1995), pp. 44-61</i>	Kami meneliti pertanyaan dari voting ekonomi di negara-negara demokrasi industri utama. Menggunakan waktu yang dikelompokkan dalam serial data untuk 17 negara dari 1960-1987, kami berpendapat bahwa besarnya dan sifat hubungan antara kondisi ekonomi dan suara tergantung pada tingkat perkembangan negara kesejahteraan. Ditemukan bahwa (a) di negara-negara dengan tingkat pengeluaran kesejahteraan dengan rendah ke tingkat sedang, perekonomian memiliki efek lebih dramatis pada peningkatan suara ketika hal-hal yang baik daripada ketika hal-hal yang buruk, dan (b) ekonomi memainkan kurang dari peran di negara-negara dengan tingkat tinggi belanja, terlepas dari arah perubahan ekonomi. implikasi atau perilaku voting, akuntabilitas demokratis

			dan membahas kebijakan kesejahteraan.
16.	1986	<i>Comparative Economic Voting: Britain, France, Germany, Italy</i> Michael S. Lewis-Beck <i>American Journal of Political Science</i> Vol. 30, No. 2 (May, 1986), pp. 315-346	<p>Sekarang, sejumlah studi agregat kronologis waktu pada ekonomi dan pemilu di negara-negara Eropa Barat telah muncul. Tapi hasil mereka bertentangan. Dan, hampir tidak ada penelitian survei yang dilakukan untuk membantu menyelesaikan kontradiksi-kontradiksi ini. Di sini, dianalisis data survei baru tentang ekonomi dan suara, berkumpul pada tahun 1983 survei Euro-Barometer dilakukan di Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia. Di negara-negara ini, voting ekonomi jelas dan konsisten. Secara khusus, evaluasi retrospektif, calon dan afektifitas kinerja ekonomi pemerintah memberi efek signifikan secara statistik dan substantif yang kuat pada kemungkinan suara untuk koalisi incumbent. Sebaliknya, keadaan ekonomi perseorangan, tidak peduli seberapa diukur, menunjukkan tidak ada efek pada melemahnya pemberian suara. Secara keseluruhan, kondisi ekonomi muncul sebagai penentu suara yang relatif penting. Ketika, model multi-persamaan umum yang ditetapkan lebih tepat suara diperkirakan, ekonomi menunjukkan dirinya untuk menjadi sekuat faktor tradisional</p>

			yang digunakan untuk menjelaskan suara Eropa Barat. Secara khusus, variabel ekonomi melebihi dampak identifikasi partisan di Inggris, dan kira-kira hal yang sama berlaku di Jerman. Selain itu, variabel ekonomi lebih berpengaruh daripada perpecahan sosial kelas dan agama di manapun kecuali Italia.
--	--	--	---

2.3.1. Model Ekonomi Modern Sebagai Dasar Perilaku Pemilih

Melalui penelitian kuantitatif dengan mengembangkan model pilihan publik (*public choice*) yang menekankan pertimbangan rasionalitas ekonomi, Ungureanu memperkuat temuan bahwa alasan-alasan ekonomi merupakan sesuatu yang sangat penting dalam menentukan keputusan-keputusan politik (Ungureanu, 2013). Penelitian itu mengkonfirmasi kembali arti penting argumen-argumen rasional ekonomi dalam kehidupan politik. Praktik model ekonomi modern melibatkan asumsi-asumsi yang tidak realistik.

Berhubung menguji model seperti itu bukanlah suatu perkara yang mudah maka peneliti menghadapi masalah dalam menentukan apa yang sesungguhnya menjadi variabel dependen. Solusinya adalah menggunakan analisis kekokohan (*robustness*). Metode kekokohan itu merupakan metode non empiris yang dalam penelitian ini dikenal sebagai pasca-empirisme (*post-empirism*). Hal itu bersesuaian dengan apa yang sedang digali dalam penelitian ini, yakni faktor

ekonomi dan rasional apakah menjadi faktor dominan dalam perilaku memilih pemilih Partai Golkar pada Pemilu di tiga daerah di Jawa Tengah.

2.3.2. Perilaku Pemilih Ditentukan oleh Kebijakan Publik

Studi Schoen menjelaskan bahwa perilaku politik masyarakat ditentukan oleh kebijakan publik yang diputuskan oleh pemerintah (Schoen, 2014). Melalui perspektif demokrasi dan kebijakan publik studi Schoen menunjukkan perilaku terhadap kebijakan publik ternyata tidak memiliki pengaruh yang kuat terhadap perilaku dalam memilih. Peran dari perilaku kebijakan sangat ditentukan oleh berbagai faktor lain seperti komunikasi kampanye. Opini publik dan perilaku politik dalam kampanye tidak serta merta menunjukkan perilaku politik dalam menentukan pilihan. Jadi faktor konteks di mana respons itu diberikan menjadi penting dalam menentukan perilaku politik.

Begitu juga studi yang dilakukan oleh Nadiah, Ngah, dan Abdullah (2014) dalam artikel yang berjudul “Perilaku pemilih dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah” mencatat temuan bahwa sebagian besar pemilih memilih partai-partai politik yang berkuasa di Malaysia, sebagaimana yang tergabung dalam Koalisi Barisan Nasional dalam Pemilu 2013, tidak disebabkan oleh faktor pemimpin (Perdana Menteri Muhammad Najib), tetapi lebih didasarkan kesamaan perilaku dan pandangan terhadap pemerintah.

Dengan metode survei penelitian tersebut menyimpulkan bahwa sebagian besar pemilih FELDA memiliki persepsi dan pandangan yang positif terhadap pemerintah (69%). Mereka juga mendukung pemerintah dan memiliki kontribusi yang positif terhadap pemerintah. Hal itu memperkuat analisis bahwa mereka

memilih partai politik pendukung pemerintah lebih disebabkan oleh pandangan positif mereka terhadap pemerintah dan kebijakannya daripada faktor lain-lain.

Sejalan dengan penelitian tersebut maka penelitian ini mencoba melihat bagaimana pengaruh pilihan politik masyarakat di ketiga lokasi penelitian dalam Pemilu pada yang dilaksanakan pada tahun 2011 dan 2012. Dapat dipertanyakan apakah faktor petahana akan menjadi faktor penentu pilihan masyarakat. Apakah kebijakan publik pemerintah daerah di ketiga lokasi penelitian berpengaruh kepada pilihan politik atau malahan menghambat pilihan politik pada Pemilu pada kala itu.

Kebijakan pemerintah dijadikan faktor yang mempengaruhi pilihan politik pada umumnya berhubungan dengan kepedulian pemilih dalam merespon situasi pemerintahan di lingkungannya. Persepsi atau penilaian yang positif atau negatif terhadap pemerintah merupakan modal utama yang sangat mungkin diolah untuk kepentingan *incumbent* pada masa kini dan mendatang.

2.3.3. Pilihan Politik Dipengaruhi Faktor Kepartaian

Studi yang dilakukan Fink, Lipicer, Hafner, dan Čehovin menggarisbawahi adanya kesenjangan (*gap*) dalam perilaku politik pasca-sosialisme di Slovenia yang terkait dengan konteks kepartaian (Hafner-Fink, Lipicer, Hafner, dan Čehovin, 2014). Dengan menggunakan metode kuantitatif berdasarkan analisis bivariat dan multivariat ditemukan data bahwa faktor-faktor yang menentukan pilihan politik berubah dari waktu ke waktu. Identifikasi partai atau ikatan kepartaian mengalami penurunan yang cukup penting dalam menentukan pilihan politik. Faktor kepartaian mengalami penurunan diikuti

dengan faktor-faktor lain yang menentukan seperti jenis kelamin, wilayah, atau tingkat pendidikan. Namun demikian, bukan berarti bahwa faktor kepartaian tidak penting, tetapi mengalami penurunan.

Dari studi tersebut dapat ditarik kesesuaian isu dalam artikel karya Fink, Lipicer, Hafner, dan Čehovin dengan penelitian disertasi ini. Arahnya adalah identifikasi partai tentunya menjadi pertimbangan dalam menentukan pilihan politik pemilih partai yang bersangkutan. Dalam hal ini pendukung Partai Golkar diuji soliditas dan kesetiaan pilihan politiknya ketika Partai Golkar mengajukan nama calon tertentu sebagai kandidat bupati dan wakilnya untuk berlaga di Pemilukada. Secara teoritis ada harapan soliditas pendukung partai mampu mempertahankan dukungan politiknya sesuai kepentingan partai. Artinya faktor kepartaian menjadi salah satu faktor utama.

Identifikasi partai menjadi elemen yang paling pokok dalam menentukan perilaku pemilih Golkar. Persepsi dan penilaian pemilih terhadap partai politik, baik yang positif maupun negatif akan menentukan sejauhmana pemilih partai dan pemilih umum menentukan pilihan-pilihan politiknya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa identifikasi partai politik terhadap program dan kebijakan yang dibuat oleh partai politik akan menentukan keputusan-keputusan politik masyarakat.

2.3.4. Perubahan Pola Perilaku Politik Mahasiswa dalam Pemilu 2013 di Malaysia

Studi Pandian mencatat temuan adanya perubahan pola perilaku politik mahasiswa pada Pemilu 2013 di Malaysia (Pandian, 2014). Apabila sebelumnya

pola perilaku mahasiswa mengikuti kebanyakan perilaku masyarakat, namun pada Pemilu 2013 perilaku politik mereka berubah lebih personal dan sejalan dengan perkembangan politik. Mahasiswa dipandang lebih kritis terhadap Pemilu 2013 dibandingkan dengan Pemilu-Pemilu sebelumnya sebagai konsekuensi dari idealismenya. Dalam pandangan mereka, pemimpin yang harus dipilih adalah mereka yang jujur, otoritatif, penuh pengetahuan, pintar, bijaksana, dan etis. Walaupun mereka tidak terlalu mengidolakan Perdana Menteri Muhammad Najib, tetapi masih menganggap tokoh tersebut layak dipilih di antara para politisi yang tergabung dalam Koalisi Barisan Nasional. Penelitian itu mengisi “*gap of knowledge*” (kesenjangan pengetahuan), khususnya menyangkut perilaku pemilih yang rasional-akademik.

Sejalan dengan penelitian itu maka penelitian disertasi ini juga melihat secara demografi politik faktor pemilih kalangan generasi muda atau mahasiswa yang berlatar belakang pendidikan sarjana akan berbeda cara pandang dan dukungan politiknya terhadap kandidat yang pantas memimpin daerahnya. Cara pandang itu merupakan cara pandang psikologis yang patut menjadi perhatian dalam penelitian disertasi ini, sehingga hasilnya akan terdukung oleh rujukan artikel tersebut. Namun demikian perlu dicatat bahwa pola perilaku pemilih mahasiswa tidak bisa dijadikan patokan terhadap perilaku politik pemilih partai Golkar, sehingga figur partai Golkar tetap saja merupakan titik tolak kampanye politik.

2.3.5. Program Strategis dapat Meningkatkan Suara Petahana

Studi yang dilakukan oleh De La O (2012) menekankan kajian pada asumsi bahwa program yang ditargetkandengan membujuk penerima manfaat untuk memberikan suara terhadap pilihan partisan pertama mereka dapat meningkatkan suara bagi kandidat petahana (*incumbent*) (De La O, 2012). Hal tersebut diperoleh dari penelitian terhadap implementasi program Progres, yaitu program bantuan tunai bersyarat (*conditional cash transfer, CCT*) di Mexico. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendaftaran awal program tersebut telah menyebabkan peningkatan jumlah pemilih dan pangsa suara petahana dalam Pemilihan Presiden pada tahun 2000. Penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa saham bagi suara partai-partai politik oposisi tidak terpengaruh oleh program. Dengan demikian bonus jumlah dukungan suara dalam Pemilu yang dihasilkan dari program CCT menjelaskan bahwa mobilisasi lebih efektif daripada mekanisme persuasif. Dengan kata lain, studi tersebut menunjukkan kecenderungan memobilisasi CCT memiliki efek yang kompatibel dengan program politik.

Program strategis menjadi sangat *urgent* sebagai pola pemimpin publik yang sedang memimpin pemerintahan. Tampaknya apabila program-program strategis pemerintah yang sedang berkuasa cenderung mendukung rakyat maka ketika berlaga di Pemilu akan mendapatkan simpati, tetapi sebaliknya, jika program-programnya tidak strategis dan cenderung korup maka rakyat pun akan menolak dengan akibat anjloknya dukungan publik dalam Pemilu. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa dalam budaya politik pemilih yang tidak loyal

penuh terhadap kepemimpinan *Incumbent* maka teori yang mengatakan bahwa *Incumbent* akan menang mudah dalam pemilihan tidak bisa dijadikan referensi.

2.3.6. Efek Pembelian Suara terhadap Perilaku Pemilih

Vicente (2014) menemukan bahwa fenomena pembelian suara (*vote buying*) dengan cara memberikan uang tunai kepada pemilih sering terjadi di berbagai belahan dunia, kendatipun dengan adanya surat suara rahasia maka tidak ada cara yang jelas untuk memastikan transaksi suara tersebut (Vicente, 2014). Untuk menyimpulkan efek pembelian suara terhadap perilaku pemilih, khususnya di negara-negara berkembang, penelitian tersebut merancang dan melakukan penelitian secara acak selama Pemilu di Sao Tome dan Principe, Afrika Barat. Peneliti mengikuti kampanye pendidikan pemilih terhadap pembelian suara, menggunakan pengukuran survei panel serta hasil Pemilu terpilah. Hasil menunjukkan bahwa pendidikan politik pada saat kampanye mengurangi pengaruh uang yang ditawarkan kepada pemilih, menurunkan jumlah pemilih, dan lebih disukai petahana. Bukti ini menunjukkan bahwa pembelian suara dapat meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu dan merugikan calon petahana.

Studi Vicente dan Wantchekon (2009) yang dipublikasikan pada artikel jurnal berjudul "Pengaruh Klientalisme Pemilih dan Pembelian Suara" membahas pandangan corak klientelisme pemilih dan pembelian suara secara luas dianggap sebagai hambatan utama bagi pembangunan ekonomi di negara berkembang (Vicente dan Wantchekon, 2009). Hal tersebut terjadi karena mereka dapat membatasi penyediaan barang publik secara obyektif dan efisien. Studi yang

memberikan tinjauan literatur terhadap fenomena klientelisme dan pembelian suara tersebut mengusulkan penelitian lapangan untuk mengevaluasi secara empiris konsekuensi dari fenomena tersebut. Mereka memberikan gambaran, membahas implementasi, dan menginterpretasikan hasil utama percobaan lapangan yang dilakukan oleh penulis di negara-negara Afrika Barat. Klientelisme dan pembelian suara tampak efektif dalam praktiknya secara elektoral. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan akses terhadap informasi dan partisipasi politik perempuan dapat membatasi klientelisme. Selain itu, kampanye pendidikan pemilih dapat menghambat efek pembelian suara pada perilaku pemilih. Para peneliti berpendapat bahwa temuan mereka dapat menginformasikan rancangan intervensi bantuan pembangunan sebagai cara efektif untuk meningkatkan akuntabilitas politik publik yang baik.

Hal serupa juga diteliti Nurdin (1999) sebagaimana terbaca dalam artikel yang berjudul “Korelasi Politik Uang dan Perilaku Pemilih” yang dilakukan dengan metode campuran (*mixed method*) antara tipe penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan *Structural Equation Model* (SEM), sehingga mencatat temuan bahwa terdapat korelasi yang kuat antara politik uang (*money politics*) dan perilaku pemilih. Penelitian itu dilakukan terhadap 400 responden di Pandeglang, Jawa Barat dengan menggunakan metode *stratified random sampling*. Temuan penelitian menunjukkan data bahwa (1) status sosial ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku memilih para responden; (2) pengetahuan tentang *money politics* berpengaruh negatif terhadap perilaku

pemilih; (3) pengalaman transaksi politik berpengaruh signifikan terhadap perilaku memilih.

Studi dari ketiga judul artikel di atas memberikan arah bahwa faktor ekonomi/rasional cenderung menjadi pengaruh pada pilihan politik masyarakat pada pemilihan umum. Hal itu juga telah ditelisik dalam penelitian untuk disertasi ini.

2.3.7. Model-Model Teoritis Perilaku Pemilih

Studi Antunes (2010) meninjau model-model teoritis utama khususnya *psycho-social model*, *sociological model*, dan *rational choice theory* untuk menjelaskan pemilihan perilaku-perilaku pemilih (Antunes, 2010). Studi tersebut menjelaskan model psikososial perilaku pemilih dan teori pilihan rasional, menekankan kontinuitas teori yang saling melengkapi di antara mereka. Penelitian itu juga mengusulkan konseptualisasi untuk mengintegrasikan semua kontribusi teori yang relevan dengan menghasilkan tiga model utama perilaku pemilih (*psycho-social model*, *sociological model*, dan *rational choice theory*) dalam pendekatan yang holistik.

Dalam penelitian ini pun dicoba temukan data apakah ketiga model (*psycho-social model*, *sociological model*, dan *rational choice theory*) tersebut menjadi faktor utama dalam Pemilu yang digelar di ketiga daerah di Jawa Tengah, atau terdapat faktor-faktor lain yang tidak tertangkap dalam teori tersebut. Penelitian dalam disertasi ini mencoba mendalami hal-hal yang berkaitan dengan tiga model tersebut, sehingga penelitian ini mengelaborasi faktor apa yang

menjadi faktor elaboratif dan faktor utama yang mempengaruhi terpilihnya kandidat Bupati yang diusung Partai Golkar.

2.4. Kerangka Dasar Teoritik

2.4.1. Demokrasi Langsung dan Politik Lokal

Secara harfiah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, *Demos* (rakyat) dan *Kratos* (pemerintahan). Demokrasi lazim disederhanakan maknanya sebagai “pemerintahan (dari, oleh, dan untuk) rakyat.” Dalam sistem politik demokrasi rakyat merupakan pemberi legitimasi kepada para wakil rakyat (*elected politician*) yang menduduki jabatan-jabatan politik strategis di parlemen dan pemerintahan. Di level strategis dan teknis, prinsip-prinsip substansial dalam demokrasi diturunkan ke dalam sistem politik (demokrasi prosedural) yang variatif. Dewasa ini sistem politik yang demokratis telah diterapkan di banyak negara, terutama apabila dikaitkan dengan apa yang diistilahkan oleh Huntington sebagai fenomena gelombang ketiga demokrasi pasca era-1970-an (Huntington, 1991).

Dalam sistem demokrasi pemerintahan dibentuk melalui mekanisme Pemilu yang bebas dan demokratis. Pemilu merupakan cara rakyat untuk memberikan legitimasi dan mandat politik kepada yang dipilih. Oleh karena itu sistem Pemilu menjadi penting untuk menjamin apakah rakyat dapat memastikan diri sebagai pemberi legitimasi politik. Dalam konteks ini, Markoff misalnya, mencatat kemerosotan kualitas demokrasi terjadi manakala pilihan sistem Pemilu masih ditandai (1) pembatasan dalam kebebasan individu untuk memilih; (2) pembatasan dalam kompetisi; (3) pembatasan atau restriksi yang bersifat legal;

(4) kesenjangan sumberdaya (tidak ada kesamaan politik antara individu yang kaya dan miskin); (5) pembatasan dalam kapasitas proses elektoral untuk menentukan pemegang kekuasaan (Markoff, 2002).

Demokrasi di ranah politik lokal terkait dengan perspektif desentralisasi yang secara umum bermakna pembagian kewenangan yang tidak terpusat. Konsep ini sangat sentral dalam otonomi daerah. Dalam negara yang menganut sistem kesatuan (*unitary system*) praktik politiknya berbeda dengan negara yang menganut sistem federasi (*federal system*), kendatipun corak pemilihan pucuk pimpinan formalnya relatif sama, yakni melalui mekanisme perwakilan atau dipilih secara langsung. Perkembangan politik suatu negara dalam lingkup nasional tidak dapat dilepaskan dari konteks politik lokal. Dalam hal ini ada adagium politik populer dari Thomas Phillip “Tip” O’Neill Jr, “*All politics is local*” yang menggambarkan bahwa betapa politik lokal tak kalah pentingnya dibandingkan dengan politik nasional. Dalam hal ini keberhasilan penyelenggaraan Pemilu lokal sebagai bagian integral dari politik lokal tentu akan berdampak pada perkembangan politik nasional, terutama apabila dikaitkan dengan stabilitas politik.

Demokrasi dalam ranah politik lokal tidak lepas dari cara pandang masyarakat lokal terhadap demokrasi yang dibangun di ranah lokal. Hal tersebut digali dalam penelitian disertasi ini yakni bahwa ranah demokrasi lokal tidak berdiri sendiri dalam arti tidak lepas dari pengaruh kondisi politik nasional. Gejala yang ada di Indonesia pada fase Pemilu tahun 2004-2014 praktik politik lokal sangat dipengaruhi oleh kondisi atmosfer politik nasional. Hal ini dapat dilihat

dari kesesuaian isu yang dibangun dalam setiap Pemilu tidak lepas dari produksi isu-isu tingkat nasional.

Hal tersebut merupakan kondisi yang diterima oleh rakyat pada lingkup lokal sehingga keputusan menjatuhkan pilihan politik pada Pemilu adalah murni kehendak rakyat. Penelitian disertasi ini mencoba menggali nalar hubungan pada kajian teoritik demokrasi dengan fakta empirik penelitian. Hasil yang diharapkan adalah gambaran sejauh mana fakta teoritik dapat diimplementasikan atau malah terjadi pengecualian dari fakta empirik pada penelitian. Dengan demikian, langkah yang akan dilakukan peneliti adalah mengelaborasi fakta empirik terhadap rujukan teoritik yang dimaksud dalam penelitian ini.

2.4.2. Teori Pemilu Kepala Daerah

Pemilu merupakan bagian integral dari keberlangsungan pergantian kepemimpinan politik. Dari segi cara pemilihan maka Pemilu yang dilaksanakan dalam bingkai demokrasi dapat dilakukan secara langsung dengan melibatkan pemilih dalam Pemilu, atau secara tidak langsung dengan melalui lembaga DPRD. Dalam perspektif Pemilu langsung maka pemilihan itu segera melengkapi rezim Pemilu yang ada dengan prinsip bahwa Pemilu tidak sekadar untuk memilih para anggota legislatif (DPR, DPD, dan DPRD), tetapi juga untuk memilih presiden dan wakil presiden. Karena itulah perspektif teoritis Pemilu terkait erat dengan konteks yang disebut Norris (2004) sebagai perekrutan elektoral.

Menurut Norris (2004), rekrutan elektoral penting dilakukan di berbagai negara yang telah mapan sistem demokrasi politiknya dalam bentuk perubahan

(revisi) aturan Pemilu (*electoral law*). Rekayasa elektoral tidak berdiri sendiri, karena selalu disesuaikan dengan dinamika politik dan perkembangan kebijakan publik yang menempatkan legitimasi politik sebagai sesuatu yang mendasar (Norris, 2004). Secara struktural rekayasa elektoral mempengaruhi bahkan dapat mengubah perilaku elite politik, karena para pemilih harus mematuhi aturan main formal yang disepakati, walaupun secara kultural tidak sepenuhnya mengubah sikap dan persepsi politik masyarakat (Norris, 2004). Rekayasa elektoral lebih memungkinkan perubahan sistem Pemilu dalam hal memperkuat institusi Pemilu (King, 2003) serta dapat mencegah kemerosotan kualitas demokrasi.

Dalam kaitan itu terdapat dua pendekatan utama dalam Pemilukada, yakni Pemilukada dalam perspektif demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Terkait dengan yang pertama maka Pemilukada dilakukan melalui mekanisme Pemilu secara langsung. Sebagaimana dicatat Schiller (2010), penerapan demokrasi langsung dalam politik lokal dikaitkan dengan adanya aktivitas pemerintahan lokal yang secara politik juga terkait dengan aspek kebijakan-kebijakan lokal yang berdampak pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Karenanya, konsep partisipasi politik diperluas dengan melibatkan masyarakat dalam proses pemilihan langsung kepala daerah (Schiller, 2010). Sementara itu, perspektif demokrasi tidak langsung merujuk ke mekanisme Pemilukada melalui lembaga perwakilan di tingkat lokal sebagaimana telah diuraikan di atas.

Penelitian untuk disertasi ini mengurai aspek demokrasi langsung yang berarti kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat pada momentum yang dinamakan Pemilukada. Konsep studi partisipasi pemilih yang ditilik dalam

penelitian disertasi ini adalah apakah demokrasi langsung melahirkan perilaku partisipatif pada karakter pemilih khususnya pada pemilih Partai Golkar. Hal itulah yang menjadi perhatian dalam penelitian untuk disertasi ini, sedangkan metodenya dengan observasi keikutsertaan masyarakat dalam Pemilukada secara aktif. Maksudnya adalah masyarakat mencermati betul fase Pemilukada yang sedang berjalan dari awal hingga akhir tahapan.

Hal itu membuktikan bahwa pelaksanaan Pemilukada dipengaruhi oleh sejumlah faktor, yaitu peran pemerintah lokal dalam mensosialisasi dan mengajak masyarakatnya dalam berpartisipasi untuk mengawal jalannya Pemilukada. Di samping itu ada juga pengaruh perilaku pemilih yang berhubungan dengan semangat masyarakat untuk ikutserta dalam Pemilukada, latar sosiologis yang berupa ikatan-ikatan kepartaian dan kemasyarakatan, latar psikologis yang mengisyaratkan kenyamanan masyarakat terhadap proses Pemilukada. Adapun faktor lainnya adalah pandangan ekonomi/rasional yang membangun anggapan bahwa Pemilukada akan berdampak pada kondisi ekonomi secara langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan mereka.

2.4.3. Teori Perilaku Pemilih

Studi tentang perilaku pemilih di Indonesia dipandang relatif baru, terutama apabila dikaitkan dengan konteks Pemilu-Pemilu pasca-Orde Baru. Sebagaimana dicatat Mujani, Liddle dan Ambardi (2012), Pemilu-Pemilu legislatif di era Reformasi (sejak 1999) dan pemilihan presiden secara langsung sejak 2004, seperti halnya Pemilu 1955, cukup memenuhi norma-norma demokrasi, sehingga “punya makna untuk dianalisis lebih lanjut dalam topik yang

sudah mapan dalam studi politik di negara-negara demokrasi, yakni perilaku pemilih (*voting behavior*)” (Mujani, Liddle, dan Ambardi, 2012). Setelah kepala daerah (gubernur dan bupati/walikota) juga dipilih melalui mekanisme pemilihan umum secara langsung sejak pertengahan 2005, studi perilaku pemilih juga dapat diterapkan untuk menganalisis kasus-kasus pemilihan kepala daerah.

Mujani, Liddle dan Ambardi (2012) mencatat beberapa pertanyaan pokok dalam studi perilaku pemilih, antara lain: (1) berkaitan dengan partisipasi Pemilu (*voter turnout*): seberapa banyak warga negara yang berpartisipasi dalam Pemilu? Mengapa seseorang memutuskan ikut serta atau absen dalam Pemilu?; (2) berkaitan dengan pilihan warga terhadap partai politik atau calon anggota legislatif (untuk Pemilu legislatif), calon presiden atau calon kepala daerah: Partai apa atau calon mana yang dipilih seorang pemilih dalam Pemilu? Mengapa dia memilih partai atau calon tersebut dan tidak memilih yang lainnya? (Mujani, Liddle dan Ambardi, 2012)

Sementara itu, Kavanagh (1994) mengklasifikasi lima pendekatan untuk menganalisis perilaku pemilih. Pertama, pendekatan struktural (*structural approach*) di mana tingkah laku politik seseorang ditentukan oleh pengelompokan atau struktur sosialnya seperti kelas sosial, agama, desa-kota, bahasa dan nasionalisme. Kedua, pendekatan sosiologis (*sociological approach*), yaitu pendekatan yang hampir sama dengan pendekatan struktural, di mana tingkah laku politik seseorang dipengaruhi oleh identifikasi mereka terhadap suatu kelompok serta norma-norma yang dianut kelompok tersebut. Ketiga, pendekatan ekologis (*ecological approach*) di mana faktor-faktor yang bersifat ekologis

seperti daerah sangat menentukan perilaku politik seseorang. Keempat, pendekatan psikologis (*psychological approach*) yaitu di mana tingkah laku dan keputusan politik seseorang dipengaruhi oleh interaksi faktor-faktor internal seperti sistem kepercayaan dan faktor eksternal seperti pengalaman politik; dan kelima, pendekatan pilihan rasional (*rational choice approach*) yang mengasumsikan bahwa semakin modern dan tinggi tingkat pendidikan masyarakat, maka mereka akan selalu memperhitungkan keuntungan dan kerugian yang akan diperoleh bila melakukan suatu tindakan politik (Kavanagh, 1994).

Dari lima pendekatan tersebut teori perilaku pemilih dapat diringkas ke dalam tiga model, yakni model sosiologis, psikologis dan pilihan ekonomi/rasional. Mujani, Liddle dan Ambardi (2012), mencatat bahwa ketiga model tersebut tidak mesti bertentangan. Sebaliknya, ketiga model tersebut bisa mempunyai pengaruh relatif terhadap pilihan politik. Bahwa apa yang memengaruhi seorang pemilih untuk menetapkan pilihan politiknya dalam Pemilu merupakan kompleksitas dari tiga model tersebut (Mujani, Liddle dan Ambardi, 2012), sebagaimana disajikan berikut ini.

Penelitian untuk disertasi ini mencoba melakukan elaborasi pada tiga model yang dibangun dari pendekatan studi terdahulu, yaitu tinjauan dari aspek teori pendekatan model sosiologi, model psikologi, dan ekonomi/rasional. Targetnya menghasilkan fakta empirik bahwa pendekatan dengan ketiga model tersebut dapat terpotret temuan baru sebagai bentuk elaborasi dari ketiga model tersebut.

2.4.3.1. Model Sosiologis

Model sosiologis adalah model yang terawal muncul dalam tradisi studi perilaku pemilih. Model ini berkembang di Eropa dan Amerika Serikat pada tahun 1950-an dan dibangun dengan asumsi bahwa perilaku pemilih ditentukan oleh karakteristik sosiologis pemilih, terutama kelas sosial, agama, dan kelompok etnik, kedaerahan, dan bahasa (Mujani, Liddle dan Ambardi, 2012; Woshinsky, 2008). Model ini kontras dengan model ekonomi atau pilihan rasional, di mana seseorang berpartisipasi dalam Pemilu karena adanya kesadaran bahwa Pemilu penting bagi dirinya dan masyarakat banyak. Hasil Pemilu akan menentukan kebijakan-kebijakan publik yang akan berkaitan dengan semua warga negara, termasuk dirinya. Orang yang punya kesadaran demikian biasanya relatif berpendidikan, memiliki jenis pekerjaan yang terkait dengan kebijakan pemerintah, dan memiliki pendapatan yang baik. Namun, faktor utama yang dipandang mampu menggerakkan mereka adalah jaringan sosial yang memungkinkan terjadinya proses mobilisasi politik. Afiliasi organisatoris, formal atau tidak, menjadi penting dalam menentukan perilaku pemilih (Mujani, Liddle dan Ambardi, 2012).

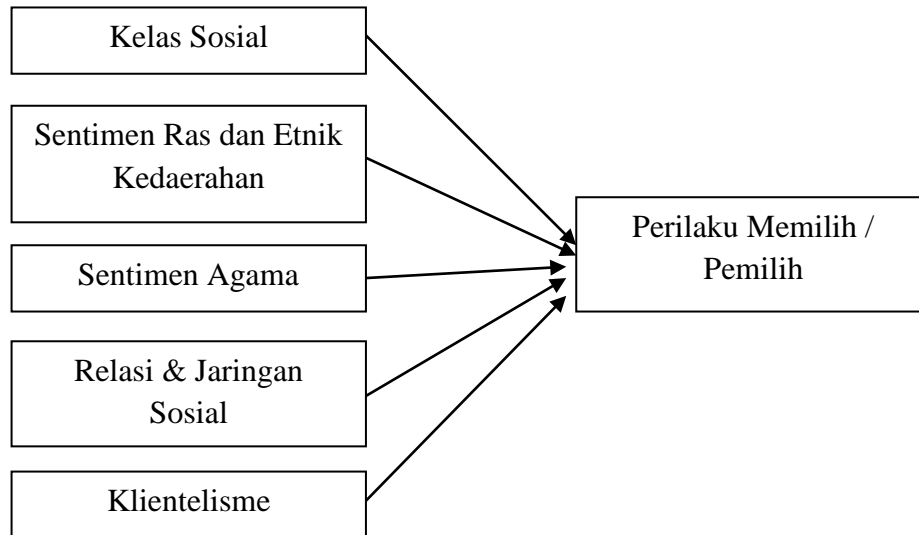
Terkait dengan kelas sosial dan sentimen keagamaan, ras dan etnik sebagai pertimbangan utama dalam Pemilu maka latar belakang perorangan yang akan dipilih menjadi pusat perhatian yang penting, termasuk kaitannya dengan konteks jaringan sosial (Huckfeldt, Johnson, dan Sprague, 2005). Dalam kontestasi politik lokal maka aspek sentimen kedaerahan seringkali menjadi pertimbangan pokok pemilih. Selain itu, dalam berbagai studi tentang perilaku pemilih, faktor agama tidak dapat dinafikan. Terlepas dari kelas sosial seseorang, orang yang taat

beragama cenderung mendukung partai politik atau calon pejabat publik yang dipandang bersikap positif terhadap agama.

Baik kelas sosial, agama, etnisitas, maupun kedaerahan dapat memicu hadirnya kekuatan kolektif untuk mendukung partai politik atau calon tertentu dalam Pemilu, lebih-lebih ketika pola-pola hubungan patron-klien antara pemilih dengan calonlah yang mengemuka (Mujani, Liddle dan Ambardi, 2012). Dalam kasus-kasus Pemilukada (Pemilu lokal) di beberapa negara Asia Tenggara, misalnya, pola patron-klien itu masih sering dijumpai sebagaimana terungkap dalam studi Hodder bahwa di Filipina ditandai oleh fenomena patronase yang kompleks dalam politik. *Political klientelisme*, di mana pemilih sangat erat dipengaruhi oleh elite atau pemimpin lokal, berlangsung secara ekspresif di Filipina (Hodder, 2014).

Studi disertasi ini mengelaborasi data model sosiologi yang terjadi di lapangan dengan melihat data-data demografi politik semisal kecenderungan tingkat pendidikan, gender, jenis pekerjaan, dan agama. Di samping itu, studi ini juga melihat kecondongan preferensi pilihan politik dari kepatuhan perintah partai atas dukungan terhadap calon Bupati yang diusung Partai Golkar. Dari studi disertasi ini diharapkan dapat ditemukan relevansi atas fakta teoritik dengan fakta empirik walaupun tentunya ada temuan lain-lain di lapangan. Ada pengerucutan temuan fakta teoritik yang digugah untuk di-equivalenkan dengan data di lapangan, yakni kelas sosial, sentimen ras, etnik kedaerahan, sentimen agama, relasi jaringan sosial, dan klientalisme.

Gambar 2.1. Model Sosiologis Perilaku Pemilih



2.4.3.2. Model Psikologis

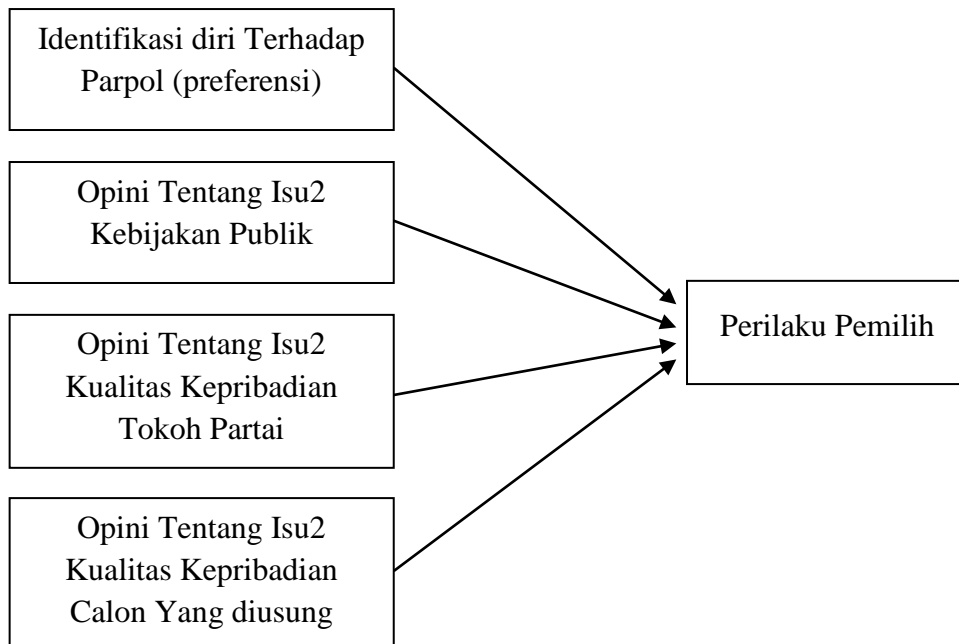
Model psikologis merupakan bagian dari konsep komprehensif psikologi politik. Sebagaimana dicatat Stone (1981), definisi yang komprehensif dari psikologi politik, mencakup; (1) kontribusi proses psikologis dalam perilaku politik; dan (2) efek psikologis dari sistem dan peristiwa politik (Stone, 1981). Model psikologis menjelaskan seseorang berpartisipasi dalam Pemilu karena tertarik pada politik, punya perasaan dekat dengan partai tertentu (identitas partai atau *Party ID*), memiliki informasi yang cukup untuk menentukan pilihan, merasa suaranya berarti, serta percaya bahwa pilihan politiknya dapat memperbaiki keadaan (*political efficacy*), sehingga ia senantiasa berikhtiar untuk memiliki keterlibatan politik (*political engagement*). Orang yang memiliki informasi lebih

banyak tentang masalah-masalah publik cenderung lebih mampu menentukan sikap dan melakukan tindakan politik, termasuk untuk ikut serta dalam Pemilu. Dalam konteks ini, sikap partisan (*partisanship*) sebagai suatu keadaan psikologis untuk mengidentifikasikan dirinya dengan partai politik tertentu merupakan komponen yang penting dalam keterlibatan politik. Seorang partisan memiliki energi psikologis yang kuat untuk mendukung pilihannya dalam Pemilu (Mujani, Liddle dan Ambardi, 2012).

Faktor psikologis membentuk suatu persepsi dan sikap partisan, karena adanya pengaruh proses sosialisasi politik yang dialaminya. Partai politik, sebagaimana agama dan kelas sosial, adalah sebuah entitas yang independen yang akan membentuk sentimen dan identitas politik seseorang. Karenanya, model psikologis tentang perilaku pemilih mencakup apa yang disebut sebagai identifikasi diri dengan partai politik, opini tentang isu-isu atau kebijakan publik yang terkait, dan opini tentang kualitas kepribadian tokoh-tokoh partai atau calon-calon yang bersaing dalam Pemilu (Mujani, Liddle dan Ambardi, 2012).

Berdasarkan model psikologis maka pada penelitian ini dikembangkan uji persepsi publik (pemilih) pada Pemilu di ketiga daerah tersebut. Peneliti mencoba menggali nalar di lapangan agar terjadi temuan yang sinkron atau sejalan dengan model psikologis, yaitu preferensi diri terhadap parpol, opini tentang isu-isu kebijakan publik, opini tentang isu-isu kualitas kepribadian tokoh-tokoh partai serta isu-isu tentang kualitas kepribadian tokoh yang diusung.

Gambar 2.2. Model Psikologis Perilaku Pemilih



2.4.3.3. Model Ekonomi/Rasional

Model ekonomi terkait dengan pertimbangan rasional dalam perilaku pemilih yang mempertanyakan apakah rasionalitas pemilih terkait oleh kecenderungan kepentingan individual atau kepentingan kolektif. Model ini dipengaruhi oleh teori pilihan rasional (*rational choice*) dan pilihan publik (*public choice*).

Pada penelitian ini model ekonomi rasional perlu menelaah lebih lanjut tentang rasionalisasi visi dan misi kandidat ketika kampanye dilaksanakan. Ada program-program yang penting ditarik sebagai basis model ekonomi/rasional,

yakni tentang kebijakan publik yang berupa program strategis calon Bupati bilamana yang bersangkutan adalah petahana. Penelitian ini juga menelaah faktor visi misi yang berkenaan dengan lingkup ekonomi yang diharapkan mampu meningkatkan hajat hidup masyarakat setempat. Lebih jauh daripada hal itu adalah menyoroti faktor politik uang (*political buying*) dengan mempertanyakan apakah hal itu merupakan unsur dominan dalam kemenangan calon Bupati yang diusung oleh partai politik. Ada beberapa masalah yang menjadi fokus dalam model ini, yakni pertimbangan keuntungan ekonomis, pemberian uang, pemberian janji tertentu, dan kompensasi/imbalan tertentu.

2.4.4. Pilihan Rasional (*Rational Choice*)

Perspektif pilihan rasional mengasumsikan bahwa pemilih berperilaku rasional layaknya menerapkan hukum ekonomi, yakni menghitung bagaimana caranya mendapatkan hasil maksimal dengan ongkos minimal. Namun demikian, sebagaimana dijelaskan Olson bahwa hasil Pemilu adalah barang publik (*public goods*), sehingga siapapun yang menjadi pemimpin atau kebijakan publik apapun yang akan dibuat, tidak membuka ruang bagi seorang pun yang akan mendapat lebih banyak atau lebih sedikit secara pribadi, berapa pun sumbangsuhnya bagi pembentukan barang publik tersebut (Olson, 2002; Mujani, Liddle, dan Ambardi, 2012).

Karena pemilih berperilaku rasional dengan anggapan bahwa ia akan mendapatkan hasil yang sama dari Pemilu, terlepas ikut atau tidak ikut dalam pemungutan suara, maka ia akan memilih untuk tidak memilih karena tidak mau keluar ongkos dan energi. Namun, faktanya banyak orang di negara-negara

demokrasi ikut serta dalam Pemilu. Fakta inilah yang memunculkan sejumlah kritik dan membuat perdebatan teoritis berkembang (Mujani, Liddle, dan Ambardi, 2012). Salah satu yang menonjol dari perdebatan itu adalah pendekatan pilihan publik (*public choice*).

Salah satu perspektif pilihan rasional yang menonjol adalah Downsian yang merujuk pada studi Downs (1957). Downs menggarisbawahi perilaku pemilih rasional layaknya seorang konsumen atau produsen dalam memilih sebuah produk dalam teori ekonomi (Downs, 1957). Konsekuensi lebih lanjut dari perspektif tersebut adalah pertimbangan pemilih lebih ditentukan oleh kepentingan, kalau bukan egoisme ekonominya. Apabila keadaan ekonomi rumah tangga seorang pemilih di bawah pemerintahan saat ini lebih baik dibandingkan dengan periode sebelumnya maka pemilih tersebut akan memiliki calon yang ada sekarang. Sebaliknya, kalau pemilih merasa bahwa pemerintah saat ini tidak mampu mengubah ekonomi rumah tangganya maka ia cenderung menghukum pemerintah dengan cara tidak akan memilihnya dalam Pemilu (Mujani, Liddle, dan Ambardi, 2012).

Pilihan rasional tidak semata-mata pemberian langsung terhadap kompensasi dari dukungan yang diberikan kepada kandidat, tetapi rasionalitas yang dibangun adalah sejauh mana manfaat kepemimpinan kandidat setelah menjabat kedudukan yang dimaksud. Dalam penelitian disertasi ini digali fakta-fakta lapangan dengan wawancara mendalam dan FGD tentang elaborasi teori rasionalitas pilihan yang terjadi di lapangan dengan melihat bukti-bukti visi dan misi kandidat yang cenderung dapat diterima secara rasional oleh pemilih.

2.4.5. Pilihan Publik (*Public Choice Theory*)

Sebagaimana teori pilihan rasional maka teori pilihan publik mengacu pada penggunaan ekonomi sebagai alat untuk menelaah masalah-masalah politik, termasuk perilaku politik dalam kaitannya dengan konteks pengambilan keputusan kolektif. Pilihan publik mempertautkan interaksi agen kepentingan pribadi (pemilih, politisi, birokrat) yang menekankan maksimalisasi utilitas. Pilihan publik juga lazim disebut teori politik positif, betapapun sering digunakan untuk tujuan normatif, kalau bukan subyektif, dan karenanya dalam konteks perilaku pemilih, pilihan publik memandang praktik demokrasi justru cenderung mengabaikan rasional.

Caplan (2007), misalnya, mengklaim bahwa praktik politik terkendala oleh irasionalitas pemilih, atau dengan kata lain, politik bisa mendukung keyakinan irasional (Caplan, 2007). Menurut Caplan, pilihan pemilih dan keputusan ekonomi pemerintah secara inheren tidak rasional. Dalam hal kebijakan tertentu, terutama yang terkait proteksionisme, pemilih berharap menerima manfaat pribadi dengan menetapkan biaya keyakinan kepada masyarakat. Demokrasi, dalam pandangan Caplan, secara efektif mensubsidi keyakinan irasional dan inilah yang disebutnya sebagai sebuah paradoks (*paradox of democracy*). Bahwa Pemilu seringkali lebih mengakomodasi kepentingan-kepentingan khusus (*special interest*) daripada kepentingan umum (*general public*). Di sisi lain pemilih sering mengabaikan hal-hal yang terkait dengan

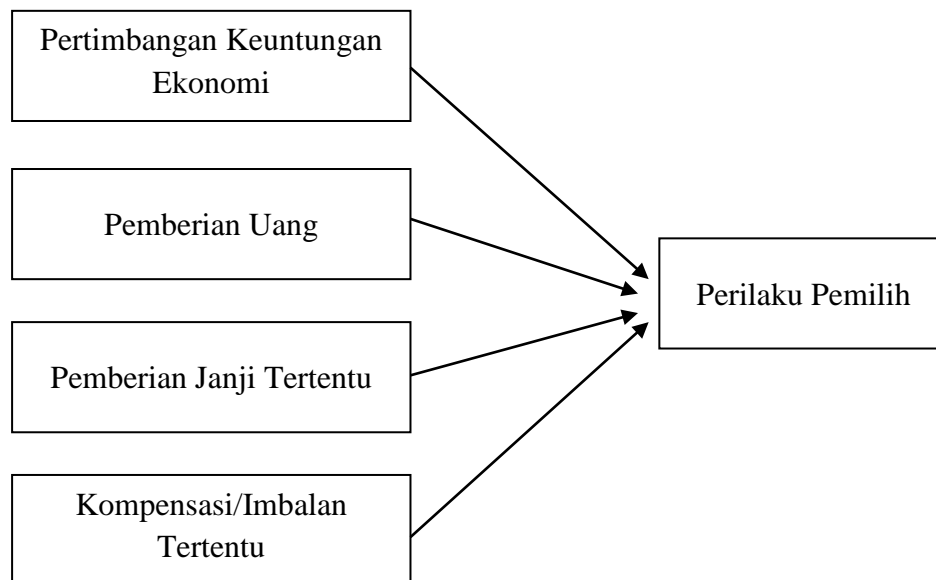
tujuan berpolitik, sehingga berakibat para politisi memiliki celah untuk memperjuangkan sejumlah agenda pribadi melalui pendekatan yang pragmatis (Caplan, 2007).

Dalam kajiannya lebih lanjut, Caplan (2007) menyatakan bahwa di balik kegagalan pemerintah terdapat tiga hal yang menyebabkannya, yakni kebodohan pemilih yang ekstrim (*extrem voter stupidity*), kesenjangan serius dalam kompetisi (*serious lack of competition*), dan tingginya ongkos negosiasi. Tiga hal itulah yang juga menyebabkan demokrasi mengalami kegagalan (*democratic failure*) (Caplan, 2007). Dari analisis yang dikembangkannya itu Caplan mengulas irasionalitas pemilih bukan merupakan suatu penyimpangan, melainkan hal yang alamiah. Caplan membedakan perilaku konsumen rasional (*rational consumer*) dengan pemilih irasional (*irrational voter*) yang dipandangnya selalu bertumpu pada “irasionalitas rasional” (*rational irrationality*). Konsep “irasionalitas rasional” pemilih inilah yang membedakan dengan perspektif pilihan rasional. Yang menarik dari perspektif Caplan dalam teori pilihan publik adalah mengemukakan konsep bahwa pilihan publik tidak selalu rasional, bahkan selalu tidak rasional, terutama apabila dikaitkan dengan konteks pertimbangan politik yang berbeda, kalau bukan aneh (*weird*) dengan pertimbangan konsumen dalam pasar ekonomi.

Dengan teori tersebut akan dikembangkan kajian melalui fakta empirik bahwa pilihan publik merupakan keputusan publik dalam melihat kandidat Bupati untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada calon Bupati demi kepentingan yang lebih besar. Ada beberapa hal yang akan dilakukan eksplorasi atas teori

pilihan publik, yakni kompensasi atas dukungan politik berupa janji-janji kandidat atas aspirasi warga untuk kepentingan yang lebih umum seperti pembenahan infrastruktur, pelayanan kesehatan gratis atau pendidikan gratis. Kemudian dikaji pula pemberian kompensasi yang bersifat umum seperti bantuan tunai dan spontan atas hajat hidup masyarakat setempat, misalnya bantuan pembangunan mushola, masjid, pemeliharaan sarana olah raga, dan sebagainya.

Gambar 2.3. Model Ekonomi/Rasional Perilaku Pemilih



2.5. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini, sebagaimana permasalahan yang tercantum di atas, berusaha menjelaskan model-model perilaku pemilih pada Pemilu di tiga kabupaten di Jawa Tengah yang berlangsung fase kedua Pemilu langsung, yakni tahun 2011-2012. Studi tentang perilaku pemilih di Indonesia dipandang relatif baru, terutama apabila dikaitkan dengan konteks Pemilu-Pemilu pasca-Orde Baru. Sebagaimana dicatat Mujani, Liddle dan Ambardi, Pemilu-Pemilu legislatif di era

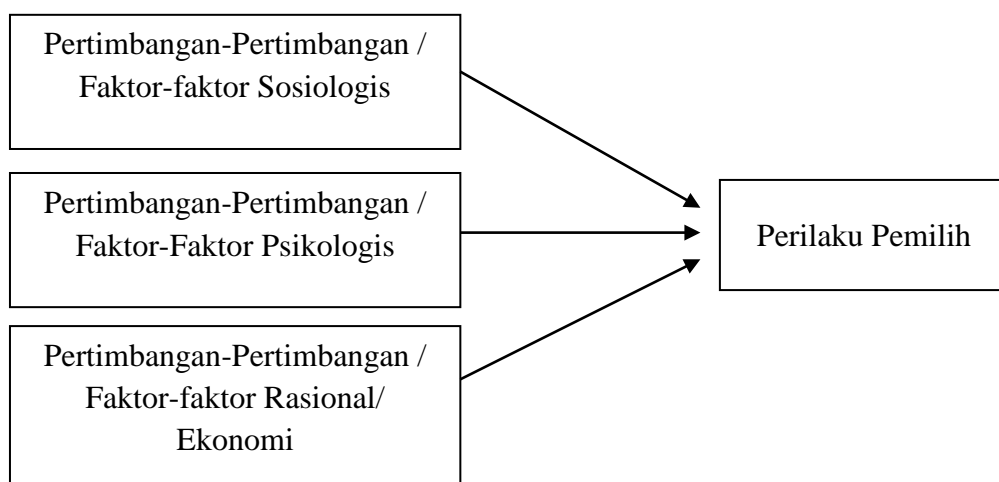
Reformasi (sejak 1999) dan pemilihan presiden secara langsung sejak 2004, seperti halnya Pemilu 1955 cukup memenuhi norma-norma demokrasi, sehingga memiliki makna untuk dianalisis lebih lanjut dalam topik yang sudah mapan dalam studi politik di negara-negara demokrasi, yakni perilaku pemilih (*voting behavior*) (Mujani, Liddle dan Ambardi, 2012). Setelah kepala daerah (Gubernur dan Bupati/Walikota) juga dipilih melalui mekanisme pemilihan umum secara langsung sejak pertengahan 2005 maka studi perilaku pemilih juga dapat diterapkan untuk menganalisis kasus-kasus pemilihan kepala daerah.

Penelitian ini mengembangkan kerangka berpikir yang didasarkan pada kesesuaian model perilaku pemilih secara teoritis dengan fakta yang terjadi di lokasi Pemilukada untuk menjawab pertanyaan apakah berlaku model psikologis, model sosiologis, atau model ekonomi/rasional. Apakah mungkin yang terjadi adalah model ketiganya atau hanya satu model saja dari ketiga model tersebut. Dengan demikian diharapkan akan tergambar pola perilaku pemilih yang dominan di masing-masing daerah tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka model kerangka berpikir yang diterapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Studi ini mencoba menarik benang merah dari fakta teoritik yakni tiga model perilaku pemilih yang kemudian dielaborasi terhadap fakta empirik. Fakta-fakta yang terurai dari masing-masing model di atas kemudian dikerucutkan untuk menjadi dasar apakah model tersebut di atas masih tetap konsisten sebagai model perilaku pemilih ataukah ada penambahan yang perlu dilakukan sebagai upaya memperbaiki teori yang dimaksud.

Fakta tersebut mungkin bisa terjadi melalui kajian yang sangat mendalam dari fakta-fakta lapangan, sehingga tiga teori yang dimaksud mengalami penambahan atas fakta empirik yang digali pada studi ini, atau malah tidak ditemukan fakta-fakta dari ketiga model yang dimaksud.

Gambar 2.4. Kerangka Pemikiran



Merujuk pada kerangka teoritis yang sudah dipaparkan sebelumnya, peneliti akan memberikan penjelasan dan batasan mengenai konsep perilaku pemilih, agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami tujuan atau maksud dari penelitian ini.

2.5.1. Perilaku Pemilih

Maksud istilah perilaku pemilih dalam penelitian ini adalah perilaku memilih konstituen Partai Golkar di tiga daerah di Jawa Tengah pada Pemilu pada yang berlangsung antara tahun 2011 hingga 2012. Sebagaimana diuraikan pada kerangka teoritis perilaku pemilih akan tergambar dari model pendekatan

sosiologis, psikologis, atau ekonomi (rasional). Pemilih menjatuhkan pilihannya berdasarkan kecenderungan terkuat dari ketiga pendekatan tersebut. Terlepas dari konteks subkultur masing-masing, apakah bersubkultur pedalaman atau pesisiran sebagaimana disinggung dalam latar belakang penelitian ini maka ketiga daerah yang menjadi objek penelitian ini pun terbuka bagi karakter perilaku pemilih yang berbeda-beda.

Penelitian ini berupaya menggali lebih tajam teori tiga model perilaku pemilih yang berkemungkinan besar terjadi pada perilaku pemilih Partai Golkar ketika pelaksanaan Pemilu pada di ketiga kabupaten yang dimaksud. Namun demikian dipertanyakan pula perilaku pemilih manakah yang paling dominan di kalangan pemilih partai Golkar dalam kompetisi politik.

2.5.2. Perilaku Pemilih Sosiologis

Yang dimaksud dengan perilaku pemilih sosiologis adalah perilaku pemilih ditentukan oleh karakteristik sosiologis pemilih terutama kelas sosial, agama, dan kelompok etnik kedaerahan, dan bahasa. Dengan demikian, sesungguhnya perilaku pemilih sosiologis merupakan perilaku pemilih yang mengedepankan sentimen-sentimen yang bersifat primordial sebagai dasar pertimbangan mereka dalam menetapkan pilihan politiknya.

Perilaku pemilih sosiologi difokuskan pada aspek-aspek yang digali dari nalar interaksi sosial politik yakni memaknai kelas sosial, relasi antarmasyarakat, serta dinamika sosial dan preferensi politik yang terjadi dalam masyarakat di ketiga kabupaten tersebut. Hal ini juga tidak lepas dari pengaruh interaksi partai politik dan kandidat bupati dan wakilnya dalam masyarakat.

Perilaku pemilih sosiologis lebih banyak mempertimbangkan faktor-faktor relasi sosial, status sosial, dan sentimen-sentimen primordial tertentu sehingga sangat tergantung pada bagaimana pemilih di daerah itu merespon stimulus politik.

2.5.3. Perilaku Pemilih Psikologis

Yang dimaksud dengan perilaku pemilih psikologis adalah perilaku pemilih ditentukan oleh faktor psikologis yang membentuk suatu persepsi dan sikap partisan pemilih, karena adanya pengaruh proses sosialisasi politik yang dialaminya. Oleh karena itu perilaku pemilih psikologis mencakup identifikasi diri dengan partai politik, opini tentang isu-isu atau kebijakan publik yang terkait, dan opini tentang kualitas kepribadian tokoh-tokoh partai atau calon-calon yang bersaing dalam Pemilu. Di samping itu model psikologis difokuskan pada isu-isu persepsi yang berkembang ketika proses dan tahapan Pemilu sudah berlangsung. Berhubung isu-isu persepsi tidak lagi berjalan secara natural, tetapi dipengaruhi faktor-faktor pembentuk opini yang dilakukan oleh para tim sukses maka di sini akan diterapkan elaborasi model psikologis untuk mencari faktor tambahan dari model ini.

Faktor psikologis pada intinya berhubungan dengan hal-hal psikologis yang terjadi pada seseorang dan bersifat personal. Faktor-faktor tersebut misalnya sesuatu yang berhubungan dengan faktor kebudayaan, faktor sosial atau faktor-faktor kependudukan lainnya. Artinya bahwa perilaku psikologis berhubungan dengan elemen-elemen yang berkaitan dengan isu-isu dan kualitas kepribadian para kandidat.

2.5.4. Perilaku Pemilih Rasional atau Ekonomi

Yang dimaksud dengan perilaku pemilih rasional atau ekonomi adalah perilaku pemilih yang ditentukan oleh pertimbangan rasional atau pertimbangan ekonomis untung-rugi dalam diri pemilih, sehingga tampaklah rasionalitas pemilih terkait oleh kecenderungan kepentingan individual (*rational choice*) atau kolektif (*public choice*). Dengan demikian, pilihan politik yang dijatuhkan oleh pemilih bukan dalam kerangka pertimbangan sosiologis atau psikologis, tetapi lebih pada pertimbangan yang lebih rasional-kalkulatif.

Adapun perihal perilaku pemilih yang berfokus pada pilihan rasional dapat diidentifikasi melalui visi dan misi kandidat bupati yang disampaikan kepada publik. Hal itu tentu akan direspon menjadi isu strategis yang diharapkan oleh publik. Hal-hal yang terkait dengan model pemilih rasional adalah pemahaman pemilih terhadap isu-isu terkait ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya saja isu tentang pelayanan publik seperti pelayanan bidang kesehatan, pembangunan infrastruktur posyandu, pemberdayaan ekonomi bagi perempuan, penataan infrastruktur jalan, jembatan, listrik, PAM dan listrik merupakan isu penting bagi pemilih rasional.

Di sisi lain isu tentang pembagian uang menjelang pencoblosan juga patut dicermati, apakah menjadi stimulus bagi pemilih melakukan pilihan politik terhadap kandidat tertentu. Isu ini juga menjadi panas di masyarakat.

Pertimbangan untung rugi menjadi faktor yang paling kuat dalam menentukan pilihan politik pada model teori ini.